



**PENGARUH APBD, PDRB DAN ANGKA PENGANGGURAN TERHADAP ANGKA  
KEMISKINAN DI MADURA**

**SKRIPSI**

Oleh:

**Abd. Salam  
NIM 080810191027**

**JURUSAN ILMU EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS JEMBER  
2015**



**PENGARUH APBD, PDRB DAN ANGKA PENGANGGURAN TERHADAP ANGKA  
KEMISKINAN DI MADURA**

**SKRIPSI**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ekonomi Pembangunan (S1) dan mencapai gelar Sarjana Ekonomi.

Oleh :

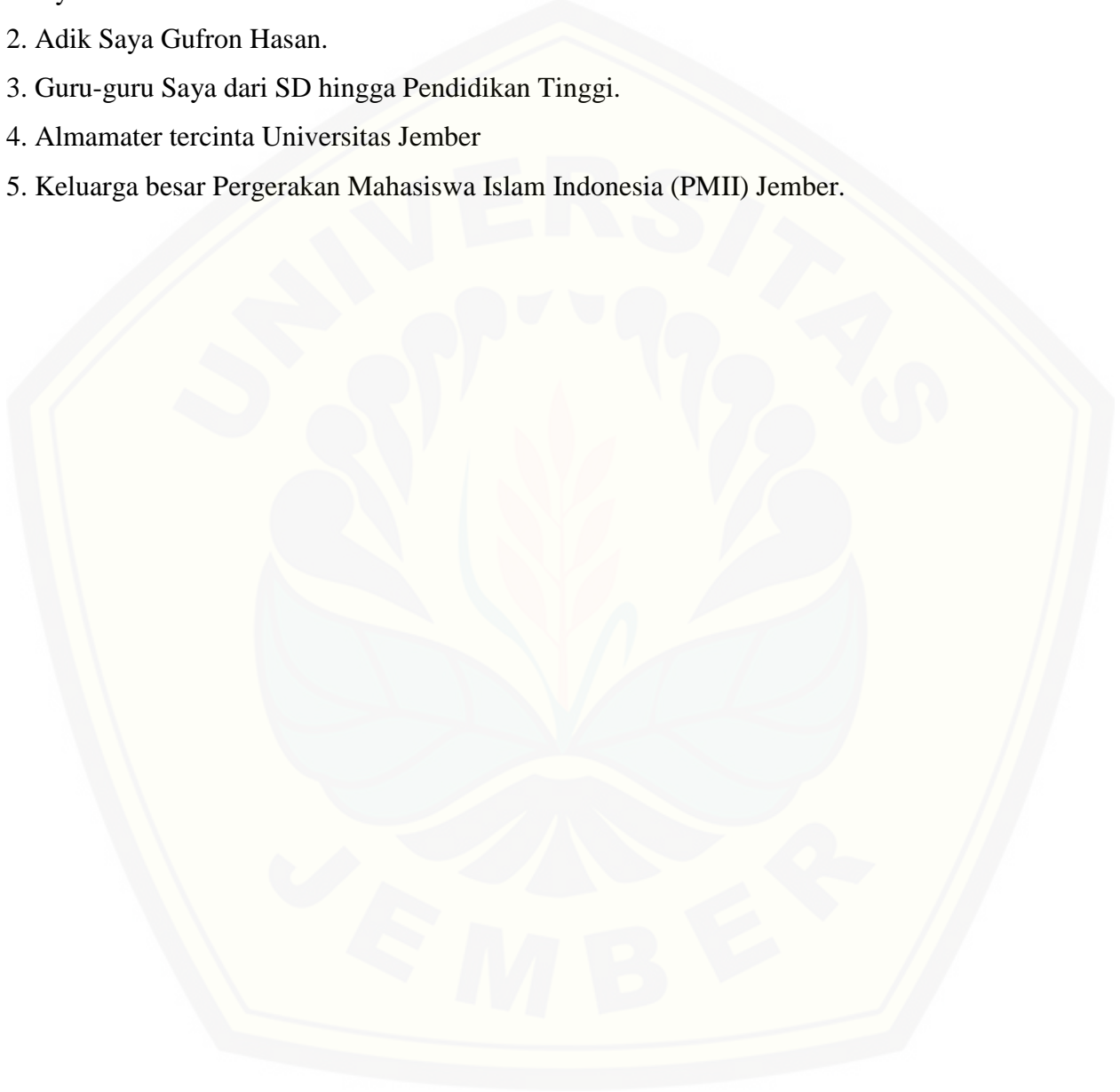
**Abd. Salam**  
**NIM. 080810191027**

**JURUSAN ILMU EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN**  
**FAKULTAS EKONOMI**  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**2015**

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini Saya persembahkan untuk :

1. Ayahanda Abduraksan dan Ibunda Sukarni tercinta.
2. Adik Saya Gufron Hasan.
3. Guru-guru Saya dari SD hingga Pendidikan Tinggi.
4. Almamater tercinta Universitas Jember
5. Keluarga besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jember.



## MOTTO

*“Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan”*

**(QS. Al-Mujadalah : 11)**

*“Tuhan tidak perlu dibela, Dia Maha segalanya ; yang perlu dibela ialah mereka yang diperlakukan tidak adil”*

**(K.H Abdurrahman Wahid)**

*“Saya tidak tahu akan diberi hidup oleh Tuhan sampai umur berapa, tetapi permohonanku kepada-Nya ialah supaya hidupku ini ialah hidup yang bermanfaat. Manfaat bagitanah air dan bangsa, manfaat bagi sesame manusia. Permohonanku ini saya panjatkan pada tiap-tiap sembahyang. Sebab Dialah asal segala asal, dialah “Purwaning Dumadi”*

**(Soekarno)**

*“Bumi ini cukup untuk tujuh generasi, namun tidak cukup untuk tujuh orang serakah”*

**(Mahatma Gandhi)**

*“Dzikir, Fikir dan Amal Sholeh ; Taqwa Intelektualitas dan Profesionalitas ; Kejujuran, Kebenaran dan Keadilan.*

**“Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)”**

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Abd. Salam

NIM : 080810191027

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa hasil karya ilmiah yang berjudul ‘*Pengaruh APBD, PDRB dan Angka Pengangguran terhadap Angka Kemiskinan di Madura*’ adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 30 November 2015

Yang Menyatakan,

Abd. Salam

NIM 080810191027

**PERSETUJUAN**

Yang bertandatangan dibawah ini menyetujui :

Judul Skripsi : Pengaruh APBD, PDRB dan Angka Pengangguran terhadap Angka  
Kemiskinan di Madura.

Nama Mahasiswa : Abd. Salam

NIM : 080810191027

Jurusan : Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan

Konsentrasi : Ekonomi Regional

Tanggal Persetujuan : 01 Desember 2015

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Rafael Purতোমো S, M.Si  
NIP. 195 81024 118803 1001

Dr. Teguh Hadi Priyono, S.E, M.Si  
NIP.197 0020 61994 031 002

Ketua Jurusan  
Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan

Dr. Sebastiana Viphindrartin, M.Kes  
NIP.196 41108 1989 022001

**JUDUL SKRIPSI**

**PENGARUH APBD, PDRB DAN ANGKA PENGANGGURAN TERHADAP ANGKA  
KEMISKINAN DI MADURA**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama Mahasiswa : Abd. Salam  
NIM : 080810191027  
Jurusan : Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan  
Konsentrasi : Ekonomi Regional

Telah dipertahankan di depan tim penguji pada tanggal :

20 November 2015

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Susunan Tim Penguji

1. Ketua : Drs. Badjuri M.E (.....)  
NIP. 195312251984031002
2. Sekretaris : Aisah Jumiati S.E.,M.P. (.....)  
NIP. 196809261994032002
3. Anggota : Dra. Nanik Istiyani M.Si (.....)  
NIP. 196101211987012002
4. Pembimbing I : Dr. Rafael Purtomo S, M.Si (.....)  
NIP. 195 81024 118803 1001
5. Pembimbing II : Dr. Teguh Hadi Priyono, S.E, M.Si (.....)  
NIP.197 0020 61994 031 002

Mengetahui / Menyetujui  
Universitas Jember  
Fakultas Ekonomi  
Dekan,

Dr. Moehammad Fathorrazi, M.si  
NIP. 196306141990021001



**PENGARUH APBD, PDRB DAN ANGKA PENGANGGURAN TERHADAP ANGKA  
KEMISKINAN DI MADURA**

**Abd. Salam**

*Jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Jember*

**ABSTRAK**

*Penelitian ini dilakukan di Madura dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh APBD, PDRB dan Angka Pengangguran terhadap angka kemiskinan di Madura tahun 2000-2012. Metode penelitian yang digunakan adalah metode explanatory, yaitu menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel bebas dan variabel terikat dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur. Analisis data menggunakan Analisis Regresi Linear Berganda (Multiple Linear Regression Method) dengan model panel data yang diturunkan dari teori Indeks Williamson. Hasil analisis menunjukkan variabel APBD (prob. 0,0331), PDRB (prob. 0,0680), dan variabel angka pengangguran (prob. 0,0000) berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Hal ini dibuktikan dengan tingkat  $R^2$  sebesar 0,752186 atau 75,21 persen.*

*Kata Kunci : APBD, PDRB, Angka Pengangguran, Angka Kemiskinan*



**INFLUENCE THE MAGNITUDE OF THE BUDGETS, GDP, AND UNEMPLOYMENT  
FIGURES AGAINST PROVERTY IN MADURA**

**Abd. Salam**

*Departement Of Development Economics, Faculty of Economics, University of Jember*

**ABSTRACT**

*This research was conducted in Madura with the purpose to know the influence BUDGETS, GDP and unemployment figures against proverty 2000-2012. The research method used is explanatory method, which explains the casual relationship between independent variables and dependent variables bound by using secondary data obtained from central statistical agency east java province. data analysis using multiple linear regression model with panel data is derived from the theory of index williamson. the result of analysis showed variable BUDGETS (prob. 0,0331), GDP (prob. 0,0680), and avariable number of unemployment (prob. 0,0000) positive and significant effect against the inequalities of income. This is evidenced by the level of the  $R^2$  of 0,752186 or 75,21 percent.*

*Keywords : GRANT BUDGET, GDP, Unemployment figures, Provety*

## RINGKASAN

**Pengaruh APBD, PDRB dan Angka Pengangguran Terhadap Angka Kemiskinan di Madura;** Abd. Salam, 080810191027; 2015; Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Setiap usaha pembangunan ekonomi mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja dalam usaha meningkatkan kesejahteraan Masyarakat (Kusreni dalam Badrudin, 2012:5). Dalam usaha mencapai tujuan tersebut, pemerintah beserta Masyarakat daerah harus secara bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemerintah beserta masyarakat daerah dengan menggunakan sumber daya yang ada di daerah harus mampu menaksir potensi sumber daya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah sehingga pembangunan dapat membantu melancarkan perekonomian masyarakat termasuk masalah lapangan kerja dan masalah kemiskinan.

Salah satu penyebab terjadinya kemiskinan adalah keterbatasan, bahkan ketiadaan akses dan kontrol terhadap sumber daya. Artinya, kebijakan anggaran yang tidak responsif terhadap upaya mengatasi keterbatasan atau ketiadaan akses dan kontrol oleh orang miskin akan berdampak melanggengkan kemiskinan itu sendiri. Oleh karena itu, anggaran menjadi salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk mengatasi persoalan kemiskinan. Peningkatan anggaran pengeluaran pemerintah terjadi karena dengan *budgetary policy* pemerintah dapat mengurangi pengangguran dalam kondisi *under-employment* dengan pembiayaan secara inflatoir melalui penambahan jumlah uang yang beredar dan dapat menaikkan harga (inflasi) dalam kondisi *full employment* dengan pembiayaan secara deflatoir melalui penurunan jumlah yang beredar. Penurunan pengangguran akan berdampak pada peningkatan kapasitas produksi sehingga akan menambah produksi secara nasional dan pendapatan nasional atau produk nasional bruto. Perubahan produk nasional bruto secara relatif disebut dengan pertumbuhan ekonomi.

Penelitian ini merupakan Penelitian yang menggunakan metode *explanatory* yaitu menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel bebas dan variabel-variabel terikat serta pengaruh antara dua variabel atau lebih melalui pengujian hipotesa. Untuk mengetahui pengaruh besarnya APBD, PDRB dan Angka Pengangguran terhadap angka Kemiskinan di Madura tahun 2000-2012 digunakan Analisis Regresi Linier Berganda (*multiple linier regression method*) dengan model panel data dan sebagai alat pengolahan data menggunakan program Eviews 6. Data panel adalah data kombinasi antara deret waktu (*time series*) dan kerat lintang (*cross section*). Data *time series* adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu terhadap suatu individu. Sedangkan data *cross section* merupakan data yang dikumpulkan dalam satu waktu terhadap banyak individu. Metode data panel merupakan suatu metode yang digunakan untuk melakukan analisis empirik yang tidak mungkin dilakukan jika hanya menggunakan data *time series* maupun *cross section*.

## PRAKATA

Puji syukur kehadirat Allah, SWT atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul *‘Pengaruh APBD, PDRB dan Angka Pengangguran terhadap Angka Kemiskinan di Madura’*. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) dan mencapai gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dari berbagai pihak. Sehingga penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Rafael Purতোমো S, M.Si dan Bapak Dr. Teguh Hadi Priyono, S.E, M.Si selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan motivasi dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Drs. Badjuri, M.E, Aisah Jumiati, S.E.,M.P, Dra. Nanik Istiyani, M.Si selaku dosen penguji atas kesediaannya untuk menguji serta mengoreksi hasil karya penulis ini.
3. Ibu Aisah Jumiati, S.E selaku dosen pembimbing akademik, terima kasih atas segala arahan dan motivasinya selama penulis menempuh studi di Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
4. Ibu Dr. Sebastiana Viphindartini, M.Kes selaku ketua jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan.
5. Bapak Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Jember, Dr. Moehammad Fathorrazi, M.Si.
6. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Jember Khususnya Jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan.
7. Ayahanda Abduraksan dan Ibunda Sukarni, terima kasih atas segala motivasi, nasehat dan doa yang terus mengalir dengan penuh kasih sayang.
8. Adik tercinta Gufron Hasan, Semoga kelak menjadi pribadi yang tumbuh subur dan membanggakan kedua orang tua.
9. Sahabat-sahabati Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jember : Khususnya Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jember Masa Khidmat 2014-2015.

10. Para senior dan junior seperjuangan, khususnya keluarga besar PMII Rayon Fakultas Ekonomi Universitas Jember yang telah banyak membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini. Terima kasih atas segala kebersamaan, dukungan dan motivasi yang diberikan.
11. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga semua dukungan, bantuan , bimbingan dan doa yang telah diberikan mendapat ridho Allah,SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan yang perlu diperbaiki dan dikembangkan. Besar harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak baik di lingkungan birokrasi, akademisi maupun masyarakat secara luas.

Jember, 30 November 2015

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN DALAM .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAKSI .....</b>	<b>vii</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>x</b>
<b>PRAKATA .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB 1. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Rumusan Masalah .....</b>	<b>6</b>
<b>1.3 Tujuan Penelitian .....</b>	<b>7</b>
<b>1.4 Manfaat Penelitian .....</b>	<b>7</b>
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>8</b>
<b>2.1 Landasan Teori .....</b>	<b>8</b>
2.1.1 Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).....	8
2.1.2 Teori Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi .....	9
2.1.3 Kemiskinan dan Kesenjangan Pendapatan .....	14



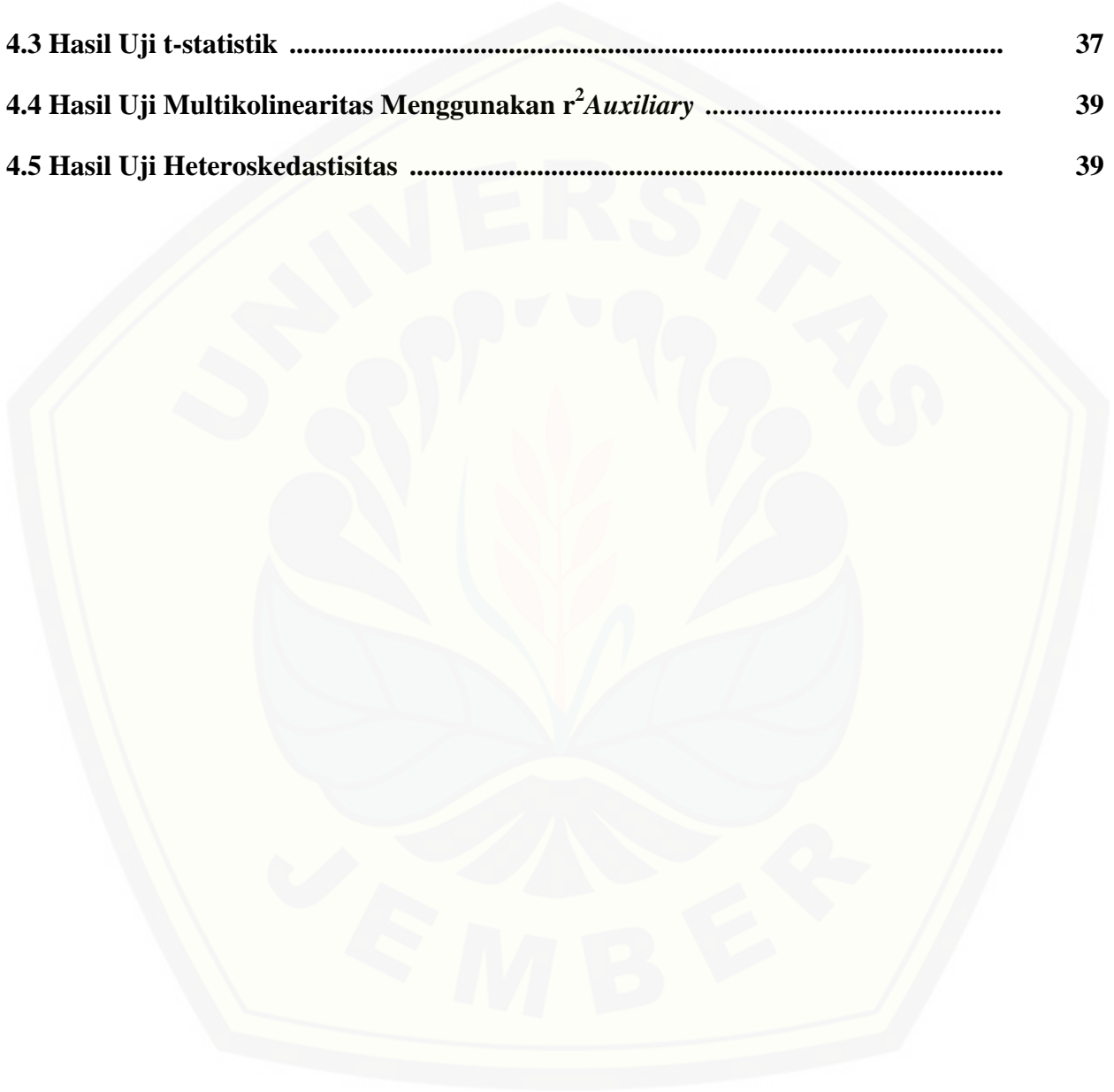
2.2 Tinjauan hasil penelitian sebelumnya .....	19
2.3 Kerangka Konseptual .....	24
2.4 Hipotesis .....	25
<b>BAB 3. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>26</b>
3.1 Rancangan Penelitian .....	26
3.1.1 Jenis Penelitian .....	26
3.1.2 Unit Analisis .....	26
3.1.3 Jenis dan Sumber Data .....	26
3.1.4 Metode Analisis Data .....	27
3.2 Pengujian Pemilihan Model dalam Pengolahan Data Panel .....	29
3.2.1 Uji Hausman Test .....	29
3.3 Uji Statistik .....	30
3.3.1 Uji Koefisien Determinasi (Uji $R^2$ ) .....	30
3.4 Uji Asumsi Klasik .....	30
3.4.1 Uji Multikolinieritas .....	30
3.4.2 Uji Autokorelasi .....	31
3.4.3 Uji Heterokedastisitas .....	31
3.4.4 Uji Normalitas .....	32
3.5 Definisi Operasional .....	32
<b>BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>33</b>
4.1 Gambaran Umum .....	33
4.1.1 Kondisi Geografis .....	33
4.1.2 Kondisi Demografi .....	33
4.1.3 Mata Pencaharian .....	34
4.2 Analisis Data .....	34

4.2.1 Hasil Uji Hausman Test .....	34
4.2.2 Analisis Regresi Data Panel .....	34
4.2.3 Uji Statistik .....	37
4.2.4 Uji Asumsi Klasik .....	38
<b>4.3 Pembahasan .....</b>	<b>41</b>
<b>BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>43</b>
<b>5.1 Kesimpulan .....</b>	<b>43</b>
<b>5.2 Saran .....</b>	<b>43</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>45</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>46</b>



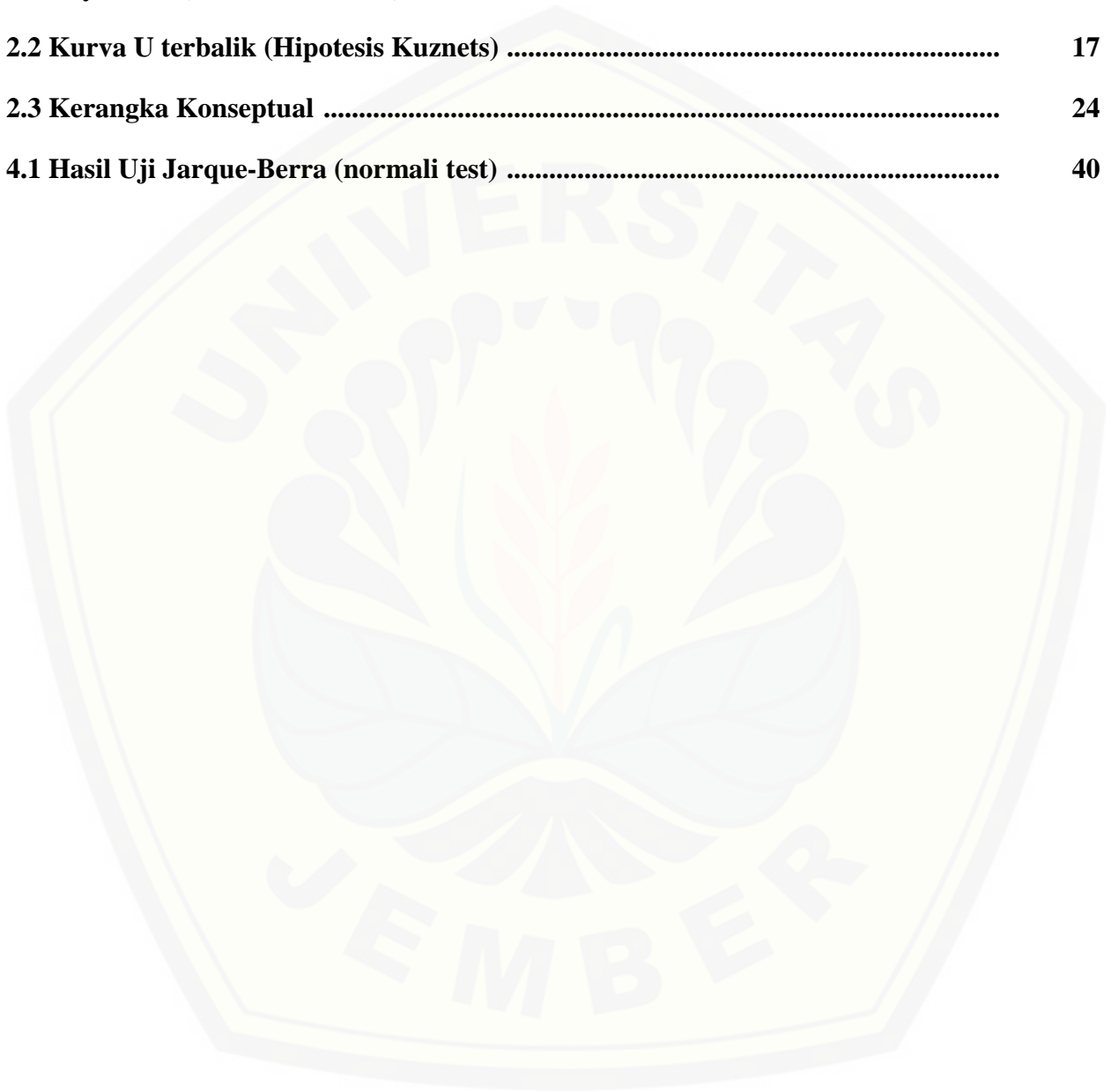
DAFTAR TABEL

	Halaman
4.1 Hasil Uji Hausman Test .....	34
4.2 Hasil Analisis Regresi Data Panel dengan pendekatan <i>fixed efek</i> .....	35
4.3 Hasil Uji t-statistik .....	37
4.4 Hasil Uji Multikolinearitas Menggunakan $r^2$ Auxiliary .....	39
4.5 Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	39



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
<b>2.1 Keynesian (Harrod – Domar) .....</b>	<b>13</b>
<b>2.2 Kurva U terbalik (Hipotesis Kuznets) .....</b>	<b>17</b>
<b>2.3 Kerangka Konseptual .....</b>	<b>24</b>
<b>4.1 Hasil Uji Jarque-Berra (normali test) .....</b>	<b>40</b>



## BAB 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah yang dilaksanakan per 1 Januari 2001 telah memberikan peran yang lebih besar kepada pemerintah dan para pelaku ekonomi daerah dalam mengelola pembangunan di daerah. Tuntutan otonomi daerah tersebut muncul karena proses pembangunan di Indonesia sebelumnya telah mengakibatkan terjadinya kesenjangan pembangunan antar wilayah di Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa serta antara Indonesia Barat dan Indonesia Timur. Kesenjangan tersebut karena adanya ketidak merataan dalam alokasi investasi antar wilayah yang berpengaruh dalam memicu dan memacu ketidakseimbangan dalam pertumbuhan antar wilayah. Oleh karena itu, pelaksanaan otonomi daerah merupakan moment yang tepat untuk memberi peran yang lebih besar kepada pemerintah dan para pelaku ekonomi daerah dalam mengelola pembangunan di daerah (Waluyo, Nugroho, Suryanto, dan Riyadi dalam badrudin, 2012:3).

Masalah pokok dalam pembangunan ekonomi daerah adalah terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan (*endogeneous development*) dengan menggunakan potensi sumber daya manusia, kelembagaan, dan sumber daya fisik secara lokal. Orientasi ini mengarahkan inisiatif yang muncul dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang peningkatan kegiatan ekonomi (Waluyo dalam Badrudin, 2012:3).

Perencanaan pembangunan meliputi juga lingkup regional atau daerah. Daerah dapat diartikan dari sudut politik maupun ekonomi. Dari sudut politik, daerah merupakan wilayah dalam suatu Negara yang dibagi secara administratif. Dari sudut ekonomi, daerah merupakan wilayah dengan masalah-masalah sosial dan ekonomi yang diakibatkan oleh kondisi alam, seperti kesuburan tanah iklim dan sebagainya (Kunarjo, 1996:154).

Setiap usaha pembangunan ekonomi mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja dalam usaha meningkatkan kesejahteraan Masyarakat (Kusreni dalam Badrudin, 2012:5). Dalam usaha mencapai tujuan tersebut, pemerintah beserta Masyarakat daerah harus secara bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemerintah beserta masyarakat daerah dengan menggunakan sumber daya yang ada di daerah harus mampu menaksir potensi sumber daya yang diperlukan untuk merancang dan membangun

perekonomian daerah sehingga pembangunan dapat membantu melancarkan perekonomian masyarakat termasuk masalah lapangan kerja dan masalah kemiskinan.

Salah satu penyebab terjadinya kemiskinan adalah keterbatasan, bahkan ketiadaan akses dan kontrol terhadap sumber daya. Artinya, kebijakan anggaran yang tidak responsif terhadap upaya mengatasi keterbatasan atau ketiadaan akses dan kontrol oleh orang miskin akan berdampak melanggengkan kemiskinan itu sendiri. Oleh karena itu, anggaran menjadi salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk mengatasi persoalan kemiskinan (Rohman, 2012:31)

Menurut Kuncoro dalam Badrudin (2012:169) penyebab kemiskinan adalah 1) secara mikro, kemiskinan karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah terbatas dan kualitasnya rendah; 2) kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia yang rendah, berarti produktifitasnya rendah, yang pada gilirannya upahnya rendah. Rendahnya kualitas sumber daya ini karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi, atau karena keturunan; dan 3) kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal. Ketiga penyebab kemiskinan ini bermuara pada teori pada lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle proverty*). Adanya keterbelakangan, ketidak sempurnaan pasar, dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktifitas sehingga menyebabkan rendahnya pendapatan yang diterima. Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi yang berakibat pada keterbelakangan, dan seterusnya.

Untuk itu, dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, penyerahan, pelimpahan, dan penugasan urusan pemerintahan kepada daerah secara nyata dan bertanggung jawab harus diikuti dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional secara adil, termasuk perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sebagai daerah otonom, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan tersebut dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas.

Menurut undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, disebutkan bahwa dalam penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumberdaya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Sumber pendanaan dalam desentralisasi daerah terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain penerimaan yang sah. Berdasarkan sumber pendanaan tersebut, maka pelaksanaan pembangunan

di daerah menjadi lebih lancar dengan tidak mengabaikan distribusi pendapatan antar wilayah yang timpang seperti yang terjadi pada masa lalu (Carson dalam Badrudin, 2012:6-7).

Menurut Soepangat dalam Badrudin (2012:64) peningkatan anggaran pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kesejahteraan masyarakat terjadi karena upaya pemerintah untuk mengurangi kesenjangan tingkat kesejahteraan antar golongan dalam masyarakat karena perbedaan pemilikan dan kesempatan penggunaan sumber daya ekonomi pada sektor swasta. Pengeluaran pemerintah yang berupa subsidi dan penyediaan barang swasta untuk golongan lemah menjadi kewajiban pemerintah. Demikian pula dengan penyediaan barang dan jasa publik bagi masyarakat akan bermanfaat bagi yang membutuhkannya sehingga penyediaan barang dan jasa publik dianggarkan pemerintah akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Soepangat dalam Badrudin (2012:64), peningkatan anggaran pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan nasional. Peningkatan anggaran pengeluaran pemerintah terjadi karena dengan *budgetary policy* pemerintah dapat mengurangi pengangguran dalam kondisi *under-employment* dengan pembiayaan secara inflatoir melalui penambahan jumlah uang yang beredar dan dapat menaikkan harga (inflasi) dalam kondisi *full employment* dengan pembiayaan secara deflatoir melalui penurunan jumlah yang beredar. Penurunan pengangguran akan berdampak pada peningkatan kapasitas produksi sehingga akan menambah produksi secara nasional dan pendapatan nasional atau produk nasional bruto. Perubahan produk nasional bruto secara relatif disebut dengan pertumbuhan ekonomi.

APBD merupakan gambaran atau tolok ukur penting keberhasilan suatu daerah dalam meningkatkan potensi perekonomian daerah. Jika perekonomian daerah mengalami pertumbuhan, maka akan mengalami pengaruh positif pada penciptaan lapangan kerja baru bagi masyarakat daerah. Dengan meningkatkan lapangan kerja baru, maka kegiatan ekonomi swasta lokal, maka APBD dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui berbagai kebijakan yang tercermin dalam APBD. Jika pemerintah daerah menetapkan anggaran belanja pembangunan lebih besar daripada anggaran pengeluaran rutin, maka kebijakan ekspansi anggaran daerah ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Kebijakan inilah yang harus dilakukan oleh setiap pemerintah daerah jika pemerintah daerah menjalankan fungsi APBD secara konsekuen sebagai fungsi alokasi sumber daya dan fungsi distribusi pendapatan. Sebaliknya jika pemerintah daerah mendesain kebijakan anggaran daerah dengan kebijakan anggaran pengeluaran rutin



daerah lebih besar dari anggaran pengeluaran pembangunan, maka kebijakan anggaran pemerintah daerah yang bersifat kontraksi ini tidak akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Menurut peraturan menteri dalam negeri nomor 37 tahun 2010 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2011, klasifikasi belanja daerah dalam APBD terdiri dari belanja rutin (belanja aparatur/ belanja tidak langsung) dan belanja pembangunan (belanja publik/ belanja langsung). Belanja rutin merupakan belanja yang digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari, seperti belanja pegawai, belanja operasional dan pemeliharaan, serta belanja perjalanan dinas. Belanja pembangunan digunakan untuk mendanai peningkatan kualitas layanan publik, berupa pembanguana prasarana dan sarana publik. Belanja pembangunan selalu menjadi sorotan utama dalam analisis belanja pemerintah karena sifatnya yang langsung menyentuh pada peningkatan kualitas layanan publik. Strategi pengalokasian belanja pembangunan oleh pemerintah daerah sangat ditentukan pada kepentingan dan kebutuhan daerah.

Pada kerangka pemikiran tersebut, pada awal periode orde baru hingga akhir tahun 1970-an, strategi pembangunan ekonomi yang dianut oleh pemerintahan soeharto lebih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Untuk mencapai tujuan tersebut maka pusat pembangunan ekonomi nasional dimulai di pulau Jawa dengan alasan bahwa semua fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan seperti pelabuhan, jalan raya dan kereta api, telekomunikasi, kompleks industri, gedung-gedung pemerintahan tersedia di Jawa dibandingkan dengan propinsi-propinsi lainnya diluar pulau jawa (Tambunan, 2003:83).

Sebagaimana diberbagai daerah, kesejahteraan di Madura masih belum besar, karena pesatnya pertumbuhan penduduk, kondisi pertanian yang sering mengalami kegagalan, dan kelesuan pasar, serta masalah-masalah sosial ekonomi lainnya. Pulau yang tidak subur, gersang dan relatif padat penduduk ini adalah bagian dari kawasan-kawasan termiskin Nusantara. Penghapusan pemerintahan yang tidak langsung pada akhir abad ke-19, yang semakin menggerogoti Rakyat tidak cukup membawa perubahan (De Jonge, 2012:173:174).

Pulau Madura dengan topografi yang relatif datar di bagian selatan dan semakin kearah utara tidak terjadi perbedaan elevansi ketinggian yang begitu mencolok. Selain itu juga merupakan dataran tinggi tanpa gunung berapi dan tanah pertanian lahan kering. Komposisi tanah dan curah hujan yang tidak sama dilereng-lereng yang tinggi letaknya justru terlalu banyak

sedangkan di lereng-lereng yang rendah malah kekurangan dengan demikian mengakibatkan Madura kurang memiliki tanah yang subur. Luas keseluruhan Pulau Madura kurang lebih 5.168 km<sup>2</sup>, atau kurang lebih 10 persen dari luas daratan Jawa Timur. Adapun panjang daratan kepulauannya dari ujung barat di Kamal sampai dengan ujung Timur di Kalianget sekitar 180 km dan lebarnya berkisar 40 km. Pulau ini terbagi dalam empat wilayah kabupaten. Dengan Luas wilayah untuk kabupaten Bangkalan 1.144,75 km<sup>2</sup> terbagi dalam 8 wilayah kecamatan, kabupaten Sampang berluas wilayah 1.321,86 km<sup>2</sup>, terbagi dalam 12 kecamatan, Kabupaten Pamekasan memiliki luas wilayah 844,19 km<sup>2</sup>, yang terbagi dalam 13 kecamatan, dan kabupaten Sumenep mempunyai luas wilayah 1.857,530 km<sup>2</sup>, terbagi dalam 27 kecamatan yang tersebar di wilayah daratan dan kepulauan. ([http://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat\\_Madura](http://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat_Madura), diakses pada tanggal 12 Oktober 2013).

Dengan kondisi geografis yang ada penduduk pulau Madura paling banyak bekerja di sektor pertanian (63,60%) selanjutnya di sektor perdagangan (11,10%) dan industri (9,40%) dan jasa kemasyarakatan (7,60%). Rendahnya partisipasi angkatan kerja di sektor industri disebabkan oleh karena memang terbatasnya industri yang ada di Madura. Sedangkan pertanian yang ada sebagian besar adalah pertanian lahan kering. Oleh karenanya sangat bergantung kepada musim. Namun demikian karena tidak ada alternatif lain tentu saja mereka yang ingin bekerja terpaksa memilih sektor pertanian. Pendidikan mereka umumnya rendah oleh karenanya mereka mencoba mengadu nasib di bidang informal khususnya perdagangan dan jasa. Mereka yang tidak tertampung di Madura sendiri pergi migrasi ke luar pulau. Itulah sebabnya tingkat mobilitas orang-orang Madura cukup tinggi. Rendahnya sektor bangunan dan konstruksi menunjukkan bahwa pembangunan secara fisik di daerah Madura masih sangat terbatas, demikian pula dengan sektor pengangkutan dan perhubungan.

Selama ini, potensi pertanian di Madura masih tergarap secara tradisional dan parsial. Masyarakat bergerak acak dan mandiri, baik inisiatif, inovasi, maupun pembiayaan. Insentif pinjaman dana dan bimbingan teknis yang diharapkan datang dari pengelola kebijakan masih sangat kurang. Keterlibatan pemerintah diharapkan menjadi pemersatu semua komponen lokal di Madura.

Pemerintah bisa menjadi penggerak denyut industri pertanian di sana. Jika selama ini mengandalkan pertanian tembakau, sudah saatnya petani Madura melirik sektor lain. Sebab, dari tahun ke tahun, pemerintah memberlakukan program pembatasan kuota areal tanam tembakau.



Pembatasan itu tidak hanya dipicu derasnya desakan dunia terhadap pengurangan dampak tembakau, melainkan juga dilandasi hasil riset yang menyatakan bahwa kualitas tembakau Madura dari waktu ke waktu menurun. Hasil penelitian tersebut kemudian menjadi pintu masuk bagi distribusi tembakau luar pulau ke Madura. Selain regulasi seputar perdagangan tembakau yang belum jelas, hal tersebut terjadi karena semangat industrialisasi global yang tak terbendung. Pemprov Jatim sudah menyiapkan skema awal rencana besar tersebut.

Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto yang terjadi pada 4 (empat) kabupaten di wilayah Madura dapat dijelaskan. Dari data-data pada tabel Dampak Jembatan Suramadu terhadap Pertumbuhan PDRB di 4 Kabupaten di Madura, dapat dijelaskan bahwa Kabupaten Bangkalan nilai pertumbuhan PDRB-nya paling besar di antara kabupaten-kabupaten di Madura. Hal tersebut terjadi karena Bangkalan merupakan daerah yang paling menikmati keberadaan jembatan Suramadu. Apabila dilihat dari pertumbuhan PDRB dapat disimpulkan bahwa makin dekat dititik/ letak jembatan Suramadu akan semakin menunjukkan perubahan yang cepat akibat meningkatnya aktivitas ekonomi.

Dengan dioperasikannya jembatan Suramadu, maka arus urbanisasi diharapkan bisa ditekan. Meningkatnya jumlah penduduk di Madura juga akan merangsang naiknya permintaan barang dan jasa. Selanjutnya akan merangsang meningkatnya kegiatan perekonomian, berkembangnya usaha di sektor pertanian, industri, perdagangan, jasa dan meningkatnya arus barang masuk ke Pulau Madura. Dengan semakin lancarnya arus lalu lintas berarti menghemat waktu dan biaya. Dengan lancarnya arus transportasi, pembangunan menjadi lebih lancar.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan pokok-pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh besarnya APBD terhadap Angka Kemiskinan di Madura tahun 2000-2012 ?
2. Bagaimana pengaruh besarnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap angka Kemiskinan di Madura tahun 2000-2012 ?
3. Bagaimana pengaruh besarnya Angka Pengangguran terhadap angka kemiskinan di Madura tahun 2000-2012 ?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui besarnya APBD terhadap Angka Kemiskinan di Madura tahun 2000-2012.
2. Untuk mengetahui Pengaruh besarnya PDRB terhadap angka Kemiskinan di Madura tahun 2000-2012.
3. Untuk mengetahui pengaruh besarnya Angka Pengangguran terhadap angka kemiskinan di Madura tahun 2000-2012.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian yang diperoleh diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai :

#### 1. Bagi Stakeholder

Bagi pemerintah daerah khususnya dapat berguna sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan pembangunan sehingga pembangunan tepat sasaran.

#### 2. Bagi Akademisi

Diharapkan akan menjadi bahan penelitian berikutnya yang berkenaan dengan pengaruh besarnya APBD, PDRB dan Angka Pengangguran terhadap Angka Kemiskinan.

#### 3. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan berkaitan dengan pengaruh besarnya APBD, PDRB dan Angka Pengangguran terhadap Angka Kemiskinan.

## BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Landasan Teori

#### 2.1.1 Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran merupakan pernyataan resmi pemerintah tentang perkiraan penerimaan dan usulan belanja pada tahun berjalan. Dengan kalimat lain, anggaran adalah sebuah rencana keuangan pilihan kebijakan pemerintah, baik kebijakan sosial maupun ekonomi (Rohman, 2012:12).

APBD adalah suatu rencana kerja pemerintah daerah yang mencakup seluruh pendapatan atau penerimaan dan belanja atau pengeluaran pemerintah daerah, baik Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam rangka mencapai sasaran pembangunan dalam kurun waktu satu tahun yang dinyatakan dalam satuan uang dan disetujui oleh DPRD dalam peraturan perundangan yang disebut peraturan daerah. Pada dasarnya fungsi dan tujuan APBD sama dengan fungsi dan tujuan APBN, hanya dalam APBD ruang lingkupnya yang berbeda. APBN berskala nasional sedangkan APBD terbatas pada wilayah daerah dan pelaksanaannya diserahkan kepada kepala daerah atau gubernur dan bupati/ walikota, serta sesuai dengan kebijakan otonomi daerah (Badrudin, 2012:97).

Pembiayaan pembangunan daerah dapat dibagi menjadi tiga kelompok : *Pertama*, pembangunan yang menjadi kewajiban pemerintah daerah, yaitu pembangunan yang dibiayai oleh pendapatan asli daerah. *Kedua*,pembangunan yang menjadi kewajiban pemerintah pusat tetapi pelaksanaannya dilakukan oleh pemerintah daerah, biayanya melalui APBN yang ditransfer ke APBD. *Ketiga*,pembangunan yang menjadi tanggungan pemerintah pusat, pelaksanaannya oleh pemerintah pusat tetapi lokasinya berada di daerah, misalnya proyek yang dibiayai dari APBN yang pengelolaannya dilaksanakan oleh departemen. Pembangunan yang merupakan kewajiban pemerintah daerah dibiayai dari sumber APBD. APBD menggambarkan kemampuan daerah dalam memobilisasi potensi keuangannya. Apabila penerimaan dari sumber daerah cukup besar maka berarti pula mengurangi ketergantungan daerah yang bersangkutan terhadap pusat. Disamping itu besarnya APBD juga berartibesar pula tingkat pelayanan yang diberikan pemerintah daerah terhadap Masyarakat (Kunarjo, 1996:156-157).

Sumber-sumber pendanaan pelaksanaan pemerintahan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah, dan lain-lain pendapatan yang sah. Pendapatan asli

daerah merupakan pendapatan yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Dana perimbangan merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana perimbangan selain dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pusat dan daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah. Ketiga komponen dana perimbangan ini merupakan sistem transfer dana dari pemerintah serta merupakan satu kesatuan yang utuh (Badrudin, 2012:99).

## 2.1.2 Teori Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi

### a. Mazhab Historis

#### i) Friedrich List

Menurut List, *system liberalism* yang *Laissez-Faire* dapat menjamin alokasi sumberdaya secara optimal. Perkembangan ekonomi hanya akan terjadi jika dalam masyarakat ada kebebasan dalam organisasi politik dan kebebasan perorangan.

Perkembangan ekonomi menurut List, melalui 5 fase yaitu fase primitif, beternak, pertanian, pertambangan dan industri pengolahan (*Manufacturing*), dan akhirnya pertanian, industri pengolahan dan perdagangan. Pendekatan List dalam menentukan tahap-tahap perkembangan ekonomi berdasarkan dari cara produksinya.

#### ii) Bruno Hilderbrand

Sebagai Kritiknya terhadap List, Hilderbrand mengatakan bahwa perkembangan ekonomi bukan didasarkan pada cara produksi atau cara konsumsi, tetapi pada cara distribusi yang digunakan. Oleh karena itu ia mengemukakan 3 sistem distribusi yaitu :

1. Natura atau perekonomian barter.
2. Perekonomian uang
3. Perekonomia Kredit

Sayangnya, Hilderbrand tidak menjelaskan proses perkembangan dari tahap tertentu ke tahap berikutnya.



**iii) Karl Bucher**

Pendapat Bucher merupakan sintesa dari pendapat List dan Hilderbrand. Menurut Bucher, perkembangan ekonomi melalui 3 tahap yaitu :

1. Produksi untuk kebutuhan sendiri (Subsisten)
2. Perekonomian kota dimana pertukaran sudah meluas
3. Perekonomian nasional dimana peran pedagang menjadi semakin penting.

**iv) W.W. Rostow**

[Teori Pertumbuhan Ekonomi W.W. Rostow](#) - [Teori pembangunan ekonomi](#) dari Rostow ini sangat populer dan paling banyak mendapatkan komentar dari para ahli. Teori ini pada mulanya merupakan artikel Rostow yang dimuat dalam *Economics Journal* (Maret 1956) dan kemudian dikembangkannya lebih lanjut dalam bukunya yang berjudul *The Stages of Economic Growth* (1960). Menurut pengklasifikasian Todaro, teori Rostow ini dikelompokkan ke dalam model jenjang linear (*linear stages mode*).

Rostow pulalah yang membuat distingsi antara sektor tradisional dan sektor kapitalis modern. Frasa-frasa ini terkenal dengan terminologi “*less developed*”, untuk menyebut kondisi suatu negara yang masih mengandalkan sektor tradisional, dan terminologi “*more developed*” untuk menyebut kondisi suatu negara yang sudah mencapai tahap industrialisasi dengan mengandalkan sektor kapitalis modern.

Dalam hal prekondisi untuk meningkatkan ekonomi suatu negara, penekanannya terdapat pada keseluruhan proses di mana masyarakat berkembang dari suatu tahap ke tahap yang lain. Tahap-tahap yang berbeda ini ditujukan untuk mengidentifikasi variabel-variabel kritis atau strategis yang dianggap mengangkat kondisi-kondisi yang cukup dan perlu untuk perubahan dan transisi menuju tahapan baru yang berkualitas. Teori ini secara mendasar bersifat unilinear dan universal, serta dianggap bersifat permanen.

Pembangunan, dalam arti proses, diartikan sebagai modernisasi yakni pergerakan dari masyarakat pertanian berbudaya tradisional ke arah ekonomi yang berfokus pada rasional, industri, dan jasa. Untuk menekankan sifat alami ‘pembangunan’ sebagai sebuah proses, Rostow menggunakan analogi dari sebuah pesawat terbang yang bergerak sepanjang lintasan terbang hingga pesawat itu dapat lepas landas dan kemudian melayang di angkasa.

Pembangunan, dalam arti tujuan, dianggap sebagai kondisi suatu negara yang ditandai dengan adanya: a) kemampuan konsumsi yang besar pada sebagian besar masyarakat, b)

sebagian besar non-pertanian, dan c) sangat berbasis perkotaan. Sebagai bagian teori modernisasi, teori ini mengkonsepsikan pembangunan sebagai modernisasi yang dicapai dengan mengikuti model kesuksesan Barat. Para pakar ekonomi menganggap bahwa [teori pertumbuhan ekonomi](#) ini merupakan contoh terbaik dari apa yang diistilahkan sebagai ‘teori modernisasi’.

Menurut Rostow, proses pertumbuhan ekonomi bisa dibedakan ke dalam 5 tahap :

1. Masyarakat tradisional (*the traditional society*),
2. Prasyarat untuk tinggal landas (*the preconditions for take-off*),
3. Tinggal landas (*the take-off*),
4. Menuju kekedewasaan (*the drive to maturity*), dan
5. Masa konsumsi tinggi (*the age of high mass-consumption*).

Dasar pembedaan tahap pembangunan ekonomi menjadi 5 tahap tersebut adalah: Karakteristik perubahan keadaan ekonomi, sosial, dan politik yang terjadi. Menurut Rostow, pembangunan ekonomi atau proses transformasi suatu masyarakat tradisional menjadi masyarakat moderen merupakan suatu proses yang multidimensional. Pembangunan ekonomi bukan hanya berarti perubahan struktur ekonomi suatu negara yang ditunjukkan oleh menurunnya peranan sektor pertanian dan peningkatan peranan sektor industri saja.

## **b. Mazhab Analitis**

### **i) Adam Smith**

Adam Smith dalam Badrudin (2012) mengungkapkan tentang teori pertumbuhan ekonomi dalam karyanya yang berjudul *An Inquiry into the Nature and Cause of the Wealth of Nations*. Bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh hukum alam, pembagian kerja dan proses pemupukan modal. Adam Smith meyakini berlakunya doktrin “hukum alam” dalam persoalan ekonomi. Ia menganggap setiap orang sebagai hakim yang paling tahu akan kepentingannya sendiri yang sebaiknya dibiarkan dengan bebas mengerjakan kepentingannya itu demi keuntungannya sendiri. Pembagian kerja menurut Smith adalah titik permulaan dari teori pertumbuhan ekonomi, yang meningkatkan daya produktivitas tenaga kerja. Ia menghubungkan kenaikan itu dengan: (1) meningkatnya keterampilan pekerja; (2) penghematan waktu dalam memproduksi barang; (3) penemuan mesin yang sangat menghemat tenaga. Teori Adam Smith mencetuskan bahwa perekonomian suatu bangsa di atur oleh *Invisible Hand* (teori tangan-tangan gaib), dimana pasar digerakkan oleh tangan yang tidak kelihatan yaitu mekanisme pasar itu

sendiri. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi ditandai oleh dua faktor yang saling berkaitan yaitu pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan output total. Sedangkan Pertumbuhan output total itu sendiri akan dicapai dipengaruhi oleh 3 komponen diantaranya sumber-sumber alam, tenaga kerja (pertumbuhan penduduk) dan jumlah persediaan.

## ii) David Ricardo

Garis besar proses pertumbuhan dan kesimpulan-kesimpulan dari Ricardo tidak jauh berbeda dengan teori Adam Smith. Tema dari proses pertumbuhan ekonomi masih pada perpacuan antara laju pertumbuhan penduduk dan laju pertumbuhan output. Selain itu Ricardo juga menganggap bahwa jumlah faktor produksi tanah (Sumber daya alam) tidak bisa bertambah, sehingga akhirnya menjadi faktor pembatas dalam proses pertumbuhan suatu masyarakat. Adapun ciri-ciri perekonomian menurut Ricardo sebagai berikut :

- a. Jumlah tanah terbatas
- b. Tenaga kerja (penduduk) meningkat atau menurun tergantung pada apakah tingkat upah diatas atau dibawah tingkat upah minimal (tingkat upah alamiah = *natural wage*).
- c. Akumulasi modal terjadi bila tingkat keuntungan yang diperoleh pemilik modal berada diatas keuntungan minimal yang diperlukan untuk menarik mereka melakukan investasi.
- d. Kemajuan teknologi terjadi sepanjang waktu.
- e. Sector pertanian dominan.

Dengan terbatasnya luas tanah, maka pertumbuhan penduduk (tenaga kerja) akan menurunkan produk marginal (*Marginal product*) yang kita kenal dengan istilah *The law of diminishing return*. Selama buruh yang dipekerjakan pada tanah tersebut bisa menerima tingkat upah diatas tingkat upah alamiah, maka jumlah penduduk (tenaga kerja) akan terus bertambah, dan hal ini akan menurunkan lagi produk marginal tenaga kerja dan pada gilirannya akan menekan tingkat upah ke bawah.

## iii) Neo Klasik (Solow-Swan)

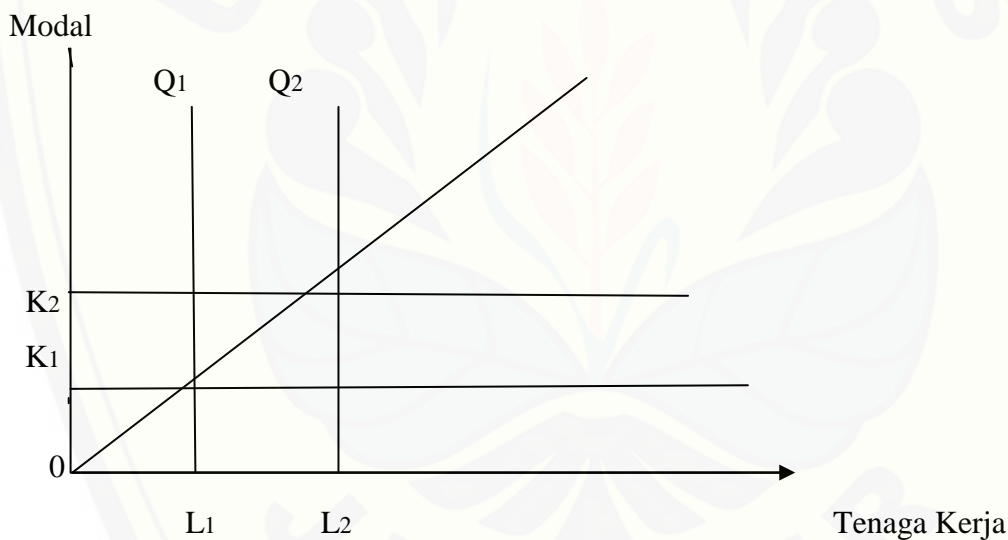
Menurut teori ini, pertumbuhan ekonomi tergantung pada penambahan penyediaan faktor-faktor produksi (penduduk, tenaga kerja, dan akumulasi modal) dan tingkat kemajuan teknologi. Pandangan ini didasarkan pada anggapan yang mendasari analisis klasik, yaitu perekonomian akan tetap mengalami tingkat pengerjaan penuh (*full employment*) dan kapasitas



peralatan modal akan tetap sepenuhnya digunakan sepanjang waktu. Dengan kata lain, sampai dimana perekonomian akan berkembang tergantung pada penambahan penduduk, akumulasi kapital, dan kemajuan teknologi.

#### iv) Keynesian (Harrod – Domar)

Teori Harrod – Domar ini merupakan perluasan dari analisis Keynesian mengenai kegiatan ekonomi secara nasional dan tenaga kerja. Analisis Keynesian dianggap kurang lengkap karena tidak membicarakan masalah-masalah ekonomi jangka panjang. Sedangkan teori Harrod-Domar ini menganalisis syarat-syarat yang diperlukan agar perekonomian bisa tumbuh dan berkembang dalam jangka panjang. Dengan kata lain, teori ini berusaha menunjukkan syarat yang dibutuhkan agar perekonomian bisa tumbuh dan berkembang dengan mantap (*Steady growth*).



Gambar 2.1 Keynesian (Harrod – Domar)

Dalam teori Harrod-Domar ini, fungsi produksinya berbentuk L karena sejumlah modal hanya dapat menciptakan suatu output tertentu (modal dan tenaga kerja tidak substitutif). Untuk menghasilkan output sebesar  $Q_1$  diperlukan modal  $K_1$  dan tenaga kerja  $L_1$ , dan apabila kombinasi itu berubah, maka tingkat output berubah. Untuk output sebesar  $Q_2$ , misalnya hanya dapat diciptakan jika stok modal sebesar  $K_2$ .

## v) Teori Schumpeter

Salah satu pendapat Schumpeter yang penting dan merupakan landasan teori pembangunannya, adalah keyakinan bahwa sistem kapitalisme merupakan sistem yang paling baik untuk menciptakan pembangunan ekonomi yang pesat. Namun demikian, Schumpeter meramalkan secara pesimis bahwa dalam jangka panjang system kapitalisme akan mengalami kemandegan (stagnasi). Pendapat ini sama dengan pendapat kaum klasik. Menurut Schumpeter, faktor utama yang menyebabkan perkembangan ekonomi adalah proses inovasi dan pelakunya adalah para inovator atau wiraswasta (*entrepreneur*). Kemajuan ekonomi suatu masyarakat hanya bisa diterangkan dengan adanya inovasi para entrepreneur. Dan kemajuan ekonomi tersebut diartikan sebagai peningkatan output total masyarakat.

### 2.1.3 Kemiskinan dan Kesenjangan Pendapatan

#### a. Konsep dan Definisi

Menurut Perpres nomor 13 tahun 2009 tentang koordinasi penanggulangan kemiskinan, pemahaman mengenai “kemiskinan” nmentilah beranjak dari pendekatan berbasis hak (*right based approach*). Dalam pemahaman ini harus diakui bahwa seluruh masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, mempunyai hak-hak dasar yang sama. Oleh karena itu, apabila ada kondisi dimana seseorang atau sekelompok laki-laki dan perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat maka hal itulah yang disebut dengan kemiskinan. Kemiskinan juga harus dipandang sebagai masalah multidimensional, tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidak mampuan ekonomi, teteapi juga kegagalan dalam memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secar bermartabat.

Menurut Kuncoro dalam Badrudin (2012:169) penyebab kemiskinan adalah 1) secara mikro, kemiskinan karena adanya ketidaksamaan pola kepemikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah terbatas dan kualitasnya rendah; 2) kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia yang renda, berarti produktifitasnya renda, yang pada gilirannya upahnya rendah. Rendahnya kualitas sumber daya ini karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi,m atau karena keturunan; dan 3) kemiskina

muncul akibat perbedaan akses dalam modal. Ketiga penyebab kemiskinan ini bermuara pada teori pada lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle proverty*). Adanya keterbelakangan, ketidak sempurnaan pasar, dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktifitas sehingga menyebabkan rendahnya pendapatan yang diterima. Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi yang berakibat pada keterbelakangan, dan seterusnya.

Menurut BPS (2008b:29-40 dalam Badrudin, 2012:174), untuk mengukur kemiskinan digunakan konsep kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Sumber data utama yang dipakai adalah data hasil survei sosial ekonomi nasional (SUSENAS) modul konsumsi yang dilaksanakan pada bulan maret 2008 dengan jumlah sampel 68.000 rumah tangga. Sehingga informasi tambahan, digunakan data hasil survei paket komoditi kebutuhan dasar (SPKKD), yang dipakai untuk memperkirakan proporsi dari pengeluaran masing-masing komoditi pokok non makanan.

Besarnya kemiskinan dapat diukur dengan atau tanpa mengacu pada garis kemiskinan. Konsep yang mengacu pada garis kemiskinan disebut kemiskinan relatif, sedangkan konsep yang pengukurannya tidak didasarkan pada garis kemiskinan disebut kemiskinan absolute. Kemiskinan relatif adalah suatu ukuran mengenai kesenjangan didalam distribusi pendapatan, yang biasanya dapat didefinisikan didalam kaitannya dengan tingkat rata-rata dari distribusi yang dimaksud. Di Negara-negara maju (DCs), kemiskinan relatif diukur dengan suatu proporsi dari tingkat rata-rata pendapatan perkapita. Suatu ukuran relatif, kemiskinan relatif dapat berbeda menurut Negara atau periode didalam suatu Negara. Kemiskinan absolute adalah derajat dari kemiskinan dibawah, dimana kebutuhan-kebutuhan minimum untuk bertahan hidup tidak dapat terpenuhi. Ini adalah ukuran tetap didalam suatu bentuk kebutuhan kalori minuman ditambah komponen-komponen nonmakanan yang juga sangat diperlukan untuk bertahan hidup. Walaupun kemiskinan absolute sering juga disebut kemiskina ekstrem, tetapi maksud dari yang terakhir ini bisa bervariasi, tergantung pada interpretasi setempat atau kalkulasi.

Kemiskinan memiliki wujud majemuk, termasuk rendahnya tingkat pendapatan dan sumber daya produktif yang menjamin kehidupan yang berkesinambungan; kelaparan dan kekurangan gizi; rendahnya tingkat kesehatan; keterbatasan dan kurangnya akses terhadap dunia pendidikan dan tempat tinggal yang tidak memadai; lingkungan yang tidak nyaman; seta

diskriminasi dan keterasingan sosial. Kemiskinan juga dicirikan oleh rendahnya tingkat partisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan dalam kehidupan sipil, sosial dan budaya (Dr. Marzuki, DEA dalam Basri, 1995:179). Sehingga sebenarnya sangat sulit untuk membedakan secara tegas antara masalah-masalah, gejala-gejala dan faktor penyebab kemiskinan karena sangat tergantung pada sudut pandang seseorang. Sepintas jika diterima apa adanya hukum lingkaran setan kemiskinan dari Nuscheler F (1996) yang berbasis pada tiga lingkaran yang saling berpotongan seakan-akan kemiskinan adalah takdir. Padahal, tentu saja tidak demikian. Karena kemiskinan pada dasarnya dapat diupayakan penyelesaiannya, tetapi dengan pendekatan-pendekatan baru yang inovatif, yaitu melalui metode-metode antisipasi terhadap perkembangan masa depan.

Penduduk miskin lebih banyak berada di daerah pedesaan daripada di daerah perkotaan, yaitu 16,9 juta jiwa atau sekitar 62,72 persen dari total penduduk miskin. Seperti diketahui bersama, pengangguran tersembunyi masih cukup banyak di pedesaan. Pada umumnya profesi penduduk miskin merupakan buruh tani yang tidak memiliki lahan atau pengusaha tani dengan lahan yang sempit di desa. Selain itu merupakan pengusaha dengan modal minim dan akses ke lembaga keuangan formal sangat terbatas. Terlalu minimnya pemilikan faktor-faktor produksi diluar tenaga kerja oleh penduduk desa ini mengakibatkan sulitnya untuk meningkatkan kehidupannya (Basri, 1995:179).

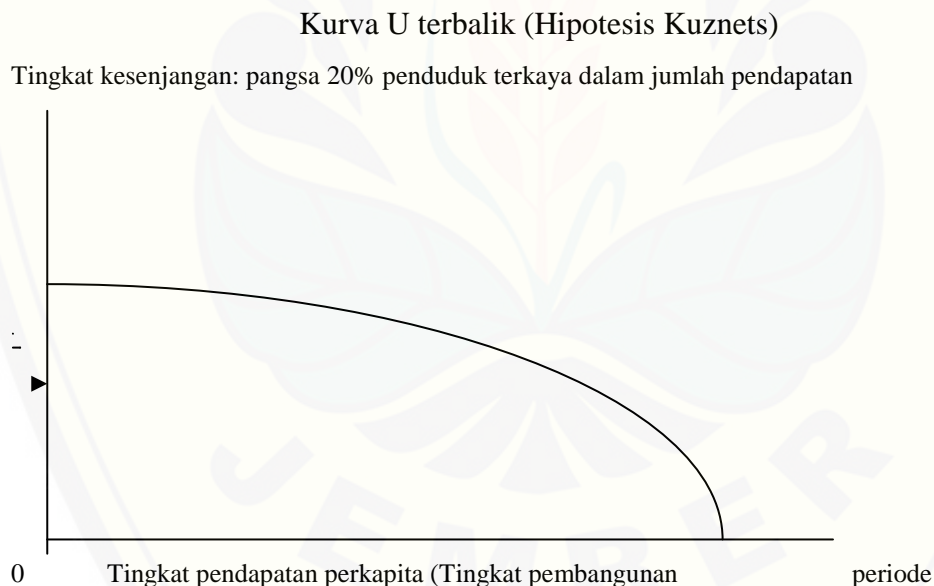
Berdasarkan pendekatan kebutuhan dasar ada tiga indikator kemiskinan yang digunakan, yaitu :

1. *Head Count Index* (HCI-PO), yaitu persentase penduduk miskin yang berada dibawah garis kemiskinan (GK).
2. Indeks kedalaman kemiskinan (*Proverty Gap Index-P1*) sebagai ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.
3. Indeks keparahan kemiskinan (*proverty Severity index-P2*) yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.



b. Hubungan antara pertumbuhan dan kesenjangan : Hipotesis Kuznets

Literatur mengenai evolusi atau perubahan kesenjangan pendapatan awalnya didominasi oleh apa yang disebut hipotesis Kuznets. Dengan memakai data lintas Negara dan data deret waktu dari sejumlah survey/ observasi disetiap Negara, Simon Kuznets menemukan adanya suatu relasi antara kesenjangan pendapatan dan tingkat pendapatan perkapita yang berbentuk U terbalik. Hasil ini diinterpretasikan sebagai evolusi dari distribusi pendapatan dalam prose transisi dari suatu ekonomi pedesaan ke suatu ekonomi perkotaan, atau dari ekonomi pertanian (Tradisional) ke ekonomi industry (modern): pada awal proses pembangunan, ketimpangan pendapatan bertambah besar sebagai akibat dari proses urbanisasi dan industrialisasi, namun setelah itu, pada proses pembangunan yang lebih tinggi atau akhir dari proses pembangunan ketimpangan menurun, yakni pada saat sector industry sebagian besar dari L yang datang dari pedesaan (sektor pertanian), atau pada saat pangsa pertanian lebih kecil didalam produksi dan penciptaan pendapatan.



Gambar 2.2 Kurva U terbalik (Hipotesis Kuznets)

Hanya sebagian dari penelitian-penelitian empiris yang ada yang hasilnya sesuai dengan hipotesis Kuznets dapat dipahami dengan menyadari bahwa sebenarnya banyak faktor lain selain pertumbuhan yang juga dapat mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan. Seperti yang dinyatakan didalam studi dari (Bourgoignon dan Morrison dan Papanek dan Kyn dalam Tambunan, 2003:86-89) faktor-faktor tersebut termasuk tingkat pendidikan rata-rata dari L

(suatu peningkatan pendidikan L secara progresif, bukan proporsional, cenderung meningkatkan ketimpangan), struktur dari X (struktur yang pincang dapat memperbesar ketimpangan), adanya distorsi dalam perdagangan (yang cenderung meningkatkan ketimpangan, sedangkan perdagangan bebas mengurangi ketimpangan di LDCs yang jumlah L-nya berlimpah). Apabila efek dari faktor-faktor nonpertumbuhan tersebut tidak turut diperhitungkan, analisis-analisis empiris mengenai kolerasi antara ketimpangan dan pertumbuhan bisa memberikan penemuan yang tidak menggambarkan hubungan yang sebenarnya.

### c. Hubungan antara pertumbuhan dan kemiskinan

Dasar dari kolerasi antara pertumbuhan pendapatan per kapita dan tingkat kemiskinan tidak berbeda dengan kasus pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan dalam distribusi pendapatan seperti yang telah dibahas diatas. Mengikuti hipotesis Kuznets, pada tahap awal dari proses pembangunan, tingkat kemiskinan cenderung meningkat, dan pada saat mendekati tahap akhir dari pembangunan jumlah orang miskin berangsur-angsur berkurang. Tentu, seperti yang telah dikatakan sebelumnya, banyak faktor-faktor lain selain pertumbuhan pendapatan yang juga berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di suatu wilayah/ Negara, seperti derajat pendidikan tenaga kerja dan struktur ekonomi.

Dasar persamaan untuk menggambarkan relasi antara pertumbuhan output agregat dan kemiskinan dapat diambil dari persamaan sebagai berikut (Wodon dalam Tambunan,2003:89).

$$\text{Log } G_{kt} = \alpha + \beta \text{Log } W_{kt} + \alpha_k + \sum_{kt} \quad (3.1)$$

Dalam persamaan tersebut, elastisitas dari ketidakmerataan dalam distribusi pendapatan terhadap pertumbuhan pendapatan adalah suatu komponen kunci dari perbedaan antara efek bruto (ketimpangan konstan) dan efek neto (ada efek dari perubahan ketimpangan) dari pertumbuhan pendapatan terhadap kemiskinan. Apabila elastisitas neto dan bruto dari kemiskinan terhadap pertumbuhan pendapatan dinyatakan masing-masing dengan  $g$  dan  $l$ , elastisitas dari ketimpangan terhadap pertumbuhan dengan  $b$ , dan elastisitas dari kemiskinan terhadap ketimpangan dengan  $d$ , maka didapat (Wodon dalam Tambunan, 2003:89-90) :

$$\Pi = \gamma + \beta\delta \quad (3.2)$$

Untuk mendapatkan elastisitas bruto dari kemiskinan terhadap pertumbuhan dan elastisitas dari kemiskinan terhadap ketimpangan (pertumbuhan sebagai variabel yang dapat dikontrol), digunakan persamaan :

$$\text{Log } P_{kt} = w + \text{Log } W_{kt} + \text{Log } G_{kt} + w_k + v_{kt} \quad (3.3)$$

Dimana  $P_{kt}$  = kemiskinan untuk wilayah  $k$  pada periode  $t$ ;  $W_{kt}$  dan  $G_{kt}$  seperti di persamaan (3.1),  $w_k$  = efek-efek yang tetap atau acak; dan  $v_{kt}$  = term kesalahan.

Kakwani dan Pernia dalam (Tambunan, 2003:93-94) mendefinisikan suatu indeks pertumbuhan prokemiskinan yang membandingkan penurunan kemiskinan yang sebenarnya terjadi akibat pertumbuhan ekonomi tanpa mempengaruhi distribusi pendapatan di sejumlah Negara di Asia Timur dan Asia Tenggara. Dengan memakai indeks ini mereka menemukan bahwa selama periode 90-an, pertumbuhan ekonomi di Korea Selatan lebih prokemiskinan secara signifikan daripada pertumbuhan di Thailand dan Lao PDR. Hasil studi ini juga menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di pedesaan lebih prokemiskinan daripada pertumbuhan ekonomi di perkotaan.

Studi-studi lainnya misalnya dari Dolar dan Kraay dan Timmer dalam (Tambunan, 2003:97) Hasil estimasi dari Dolar dan Kraay menunjukkan bahwa elastisitas pertumbuhan PDB pendapatan perkapita dari kelompok miskin adalah 1 %, yang artinya pertumbuhan rata-rata output sebesar 1 % membuat 1 % peningkatan pendapatan dari masyarakat miskin. Sedangkan, hasil estimasi dari Timmer dengan memakai teknik-teknik ekonometrik yang sama melaporkan bahwa elastisitas tersebut hanya sekitar 8%, yang artinya kurang dari proporsional keuntungan bagi kelompok miskin dari pertumbuhan ekonomi.

## 2.2 Tinjauan hasil penelitian sebelumnya

1. Reza Monanda Berutu (060523023), Pengaruh APBD terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Dairi, Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara.

Untuk melihat fluktuasi pertumbuhan ekonomi secara rill dari tahun ketahun disajikan perubahan PDRB atas dasar konstan secara berkala. Pertumbuhan yang positif menunjukkan adanya peningkatan perekonomian, sebaliknya apabila negatif menunjukkan penurunan.



Secara umum, pendapatan domestik regional bruto (PDRB) atas dasar harga konstan kabupaten Dairi mengalami peningkatan. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Kabupaten Dairi tidak terlepas dari kondisi perekonomian yang terjadi ditingkat nasional dan regional. Seperti yang terjadi pada tahun 1997 dan 1998, pertumbuhan ekonomi kabupaten Dairi pada tahun 1997 menurun sebesar 6,61% dibandingkan pada tahun 1996 sebesar 10,85%. Pada tahun 1998 kondisi perekonomian menjadi semakin buruk sehingga pertumbuhan ekonomi kabupaten Dairi menjadi 2,45%.

Hal ini disebabkan krisis ekonomi yang melanda Indonesia dan juga dikarenakan keadaan politik dan keamanan yang tidak stabil. Akibat krisis moneter ini inflasi meningkat dari tahun 1997 yakni sebesar 9,96% dan meningkat pada semester 1 tahun 1998 menjadi sebesar 40,79%.

Namun sejak tahun 1999, seiring dengan upaya pemulihan ekonomi baik ditingkat nasional maupun regional di Indonesia terlihat mulai adanya perbaikan ekonomi. Hal tersebut dapat dilihat dari laju pertumbuhan PDRB meningkat dari tahun 1998 yakni sebesar 2,45% menjadi 3,6% pada tahun 1999 dan keadaan perekonomian menjadi lebih baik pada tahun-tahun berikutnya.

Kabupaten Dairi merupakan salah satu kabupaten yang sektor pertaniannya lebih unggul dibandingkan sektor-sektor lainnya menurut PDRB berdasarkan lapangan usaha atas dasar harga konstan. Hal ini dapat terlihat pada tabel 4.6 dimana sektor pertanian pada tahun 2006 memberikan kontribusi kepada PDRB sebesar 70,08% . hal ini dikarenakan sektor-sektor lainnya mengalami peningkatan.

Sektor pertambangan dan penggalian pada tahun 2006 memberikan kontribusi kepada PDRB sebesar 0,07% pada tahun 2006 dan tidak berubah pada tahun 2007 yakni sebesar 0,07%. Sedangkan sektor industri memberikan kontribusi sebesar 0,32% pada tahun 2006 dan mengalami peningkatan pada tahun 2007 yakni sebesar 0,33%. Sektor pengolahan listrik, gas dan air bersih pada tahun 2006 memberikan kontribusi kepada PDRB sebesar 0,23% pada tahun 2006 dan mengalami peningkatan pada tahun 2007 yakni sebesar 0,31%. Sektor bangunan memberikan kontribusi kepada PDRB sebesar 0,36 % pada tahun 2006 dan tidak berubah pada tahun 2007 yakni sebesar 0,36%. Sektor perdagangan memberikan kontribusi kepada PDRB sebesar 13,45% pada tahun 2006 dan mengalami peningkatan pada tahun 2007 yakni sebesar 14,10%. Sektor pengangkutan dan komunikasi memberikan kontribusi pada PDRB sebesar 3,70% pada tahun 2006 dan mengalami peningkatan pada tahun 2007 yakni sebesar 3,80%.

Sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan pada tahun 2006 memberikan kontribusi kepada PDRB sebesar 1,14% dan mengalami peningkatan pada tahun 2007 yakni sebesar 1,15%. Sektor jasa-jasa memberikan kontribusi kepada PDRB sebesar 7,56% pada tahun 2006 dan mengalami peningkatan pada tahun 2007 yakni sebesar 8,22%.

Pengeluaran pemerintah kabupaten Dairi dari tahun 1993 sampai tahun 2007 mengalami tiga kali penurunan yaitu pada tahun 1998, tahun 2000, dan tahun 2004. Selain dari ketiga tahun tersebut pengeluaran pemerintah mengalami kenaikan. Pada tahun 2006 pengeluaran pemerintah sebesar Rp 327.994. 400.000, dan naik menjadi Rp 370.418.428.000, pada tahun 2007 .

Berdasarkan hasil analisis dengan metode OLS dibentuk persamaan sebagai berikut:

$$LY = 7,2399 + 0,2928 * LX1 + 0,3029 * LX2$$

Dari hasil persamaan diatas dapat dijelaskan pengaruh variabel bebas yaitu pengeluaran rutin (LX1) dan pengeluaran pembangunan (LX2) berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi / PDRB kabupaten Dairi (LY) sebagai variabel terikat, berikut interpretasinya :

1) Variabel pengeluaran rutin (LX1)

Variabel pengeluaran rutin (LX1) mempunyai pengaruh positif terhadap variabel pertumbuhan ekonomi / PDRB (LY). Besarnya koefisien variabel pengeluaran rutin (LX1) menunjukkan besarnya pengaruh pengeluaran rutin terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten Dairi. Pada kurun waktu 1993-2007, koefisien pengeluaran rutin (LX1) sebesar 0,2928, bila variabel lainnya dianggap konstan, berarti apabila pengeluaran pemerintah meningkat 1 persen maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi kabupaten Dairi sebesar 0,2928 persen.

2) Variabel Pengeluaran Pembangunan (LX2)

Variabel pengeluaran pembangunan (LX2) mempunyai pengaruh positif terhadap variabel pertumbuhan ekonomi / PDRB (LY). Besarnya koefisien variabel pengeluaran pembangunan (LX2) menunjukkan besarnya pengaruh pengeluaran pembangunan terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten Dairi. Pada kurun waktu 1993-2007, koefisien pengeluaran pembangunan (LX2) sebesar 0,3029, bila variabel lainnya dianggap konstan, berarti apabila pengeluaran pemerintah meningkat 1 persen maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi kabupaten Dairi sebesar 0,3029 persen.

2. Deni Sulistio Mirza, Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah Tahun 2006-2009, Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.

Berdasarkan hasil analisis dapat dijelaskan bahwa variabel kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan dengan elastisitas negatif sebesar 0,208192 terhadap indeks pembangunan manusia di Jawa Tengah pada tahun 2006 – 2009. Hal ini menunjukkan bahwa apabila rasio kemiskinan mengalami penurunan sebesar 1%, maka akan meningkatkan indeks pembangunan manusia di Jawa Tengah sebesar 0,208. Hasil ini sesuai dengan hipotesis penelitian yang menyatakan ada pengaruh kemiskinan terhadap indeks pembangunan manusia di Jawa Tengah selama tahun 2006-2009.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ginting, Charisma Kuriata S, dkk (2008) yang berjudul “Pembangunan Manusia di Indonesia”. Dalam penelitian tersebut, hasil penelitian menunjukkan koefisien kemiskinan sebesar -0,2410 dan signifikan pada tingkat kepercayaan 99,99%. Selain itu juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suradi (2007) yang berjudul “Pembangunan Manusia, kemiskinan, dan kesejahteraan” dimana hasil analisis deskriptifnya menyatakan bahwa kemiskinan berkaitan erat dan ikut menentukan proses pembangunannya yang mengedepankan partisipasi masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis dapat dijelaskan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan dengan elastisitas positif sebesar 0,153434 terhadap indeks pembangunan manusia Jawa Tengah tahun 2006-2009. Hal ini menunjukkan bahwa apabila pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan sebesar 1%, maka akan meningkatkan indeks pembangunan manusia di Jawa Tengah sebesar 0,153. Hasil ini sesuai dengan hipotesis penelitian yang menyatakan ada pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap indeks pertumbuhan manusia di Jawa Tengah selama tahun 2006-2009.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan landasan teori yang dikemukakan oleh profesor Kuzned dimana salah satu karakteristik pertumbuhan ekonomi moderen adalah tingginya pertumbuhan output perkapita (Todaro, 1997). Pertumbuhan output yang dimaksudkan adalah PDRB perkapita, tingginya pertumbuhan output menjadikan perubahan pola konsumsi dalam pemenuhan kebutuhan. Artinya semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi maka akan semakin tinggi pertumbuhan output perkapita dan merubah pola konsumsi dalam hal ini tingkat daya beli masyarakat juga akan semakin tinggi.

Berdasarkan hasil analisis dapat dijelaskan bahwa variabel belanja modal berpengaruh positif dan signifikan dengan elastisitas positif sebesar 0,274209 terhadap indeks pembangunan manusia di Jawa Tengah tahun 2006-2009. Hal ini menunjukkan bahwa apabila rasio belanja modal yang dikeluarkan mengalami peningkatan sebesar 1%, maka akan meningkatkan indeks pembangunan manusia di Jawa Tengah sebesar 0,274. Hasil ini sesuai dengan hipotesis penelitian yang menyatakan ada pengaruh belanja modal terhadap indeks pembangunan manusia di Jawa Tengah selama tahun 2006-2009. Keterkaitan antara belanja modal dengan indeks pembangunan manusia sangat erat dimana kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kualitas SDM didasarkan kepada pemikiran bahwa pendidikan tidak sekedar menyiapkan peserta didik agar mampu masuk dalam pasaran kerja, namun lebih dari pada itu, pendidikan merupakan salah satu upaya pembangunan watak bangsa (*National Character Building*) seperti kejujuran, keadilan, keikhlasan, kesederhanaan, dan keteladanan.

3. Nirma Windy Saputri,(2006), dengan judul “Evaluasi Kinerja Ekonomi dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Kabupaten Jember periode 1995-2004, Fakultas Ekonomi Universitas Jember”

Anggaran pendapatan belanja daerah di kabupaten Jember mulai tahun 1995-2004 mengalami peningkatan terus menerus sehingga pada tahun 1995 APBD Rp. 2.037 juta dan pada tahun 2004 mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp. 662.154 juta. Dalam kurun waktu 1995-2004 perkembangan APBD tertinggi terjadi pada tahun 2003 yaitu sebesar 91,03 % atau sebesar Rp. 586.631 juta dari tahun sebelumnya sedangkan terendah terjadi pada tahun 1997 yaitu sebesar -5,45 % atau menurun sebesar Rp. 127,00 juta dari tahun sebelumnya. Perkembangan rata-rata APBD tiap tahunnya mengalami peningkatan sebesar 34,28 % atau mencapai Rp. 73.346,33 juta tiap tahun.

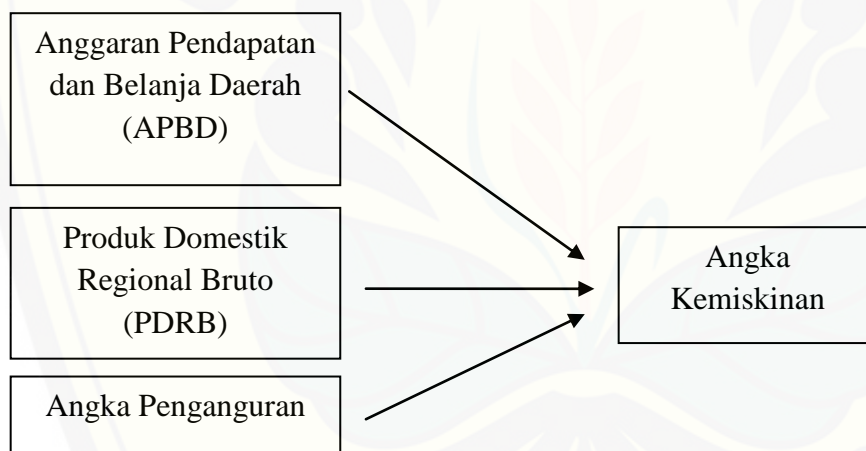
Pertumbuhan ekonomi di kabupaten jember belum menunjukkan kemajuan yang pesat dari tahun 1995-2004, bahkan justru mengalami penurunan, pada tahun 1995 sebesar 8,59 % dan hingga tahun 2004 berubah menjadi sebesar 5,06 %. Pada tahun 1998 pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan yang sangat tajam yaitu sebesar -7,58 % dari tahun sebelumnya sebesar 4,5 % pada tahun 1997. Pada tahun 1998 tersebut pertumbuhan ekonomi berada pada titik yang terendah sedangkan pertumbuhan ekonomi tertinggi pada tahun 1996 sebesar 8,71 %. Rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 3,66 % tiap tahunnya.



Tingkat pengangguran di kabupaten Jember selama kurun waktu 1995-2004 mengalami kenaikan dan penurunan tiap tahunnya. Pada tahun 1995, pertumbuhan ekonomi sebesar 4,81 % dan hingga tahun 2004 berubah menjadi sebesar 2,19 %. Tingkat pengangguran tertinggi terjadi pada tahun 2004 yaitu sebesar 2,19 %. Rata-rata tingkat pengangguran mengalami perubahan sebesar 4,81 %, sedangkan tingkat pengangguran mengalami perubahan sebesar 3,447 % tiap tahunnya.

Jumlah penduduk miskin di kabupaten jember pada tahun 1995-2004 mengalami perubahan naik turun tiap tahunnya. Pada tahun 1995 jumlah penduduk miskin mencapai 410.082 jiwa. Jumlah penduduk miskin tertinggi terjadi pada tahun 2000 yaitu sebesar 321.432 jiwa. Rata-rata jumlah penduduk miskin tiap tahunnya mengalami penurunan sebesar 5,63 % atau penurunan mencapai 9800 jiwa tiap tahunnya.

### 2.3 Kerangka Konseptual



Gambar 2.3 Kerangka Konseptual

Berdasarkan kerangka konsep di atas dapat dijelaskan bahwa besarnya APBD, PDRB, dan Angka Pengangguran menjadi suatu analisis untuk mengetahui pengaruhnya terhadap Angka Kemiskinan di 4 Kabupaten di Madura.



## 2.4 Hipotesis

Berdasarkan teori dan hasil penelitian maka dapat diajukan beberapa hipotesis sebagai berikut:

1. APBD berpengaruh signifikan terhadap angka kemiskinan.
2. PDRB berpengaruh signifikan terhadap angka kemiskinan.
3. Angka Pengangguran berpengaruh signifikan terhadap angka kemiskinan.



## BAB 3. METODE PENELITIAN

### 3.1 Rancangan Penelitian

Rancangan penelitian adalah suatu usulan untuk memecahkan masalah dan merupakan rencana kegiatan yang dibuat peneliti untuk memecahkan masalah, sehingga akan diperoleh data yang valid sesuai tujuan penelitian.

#### 3.1.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan Penelitian yang menggunakan metode *explanatory* yaitu menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel bebas dan variabel-variabel terikat serta pengaruh antara dua variabel atau lebih melalui pengujian hipotesa (Sugiyono, 2012: 11).

#### 3.1.2 Unit Analisis

Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Angka Kemiskinan (AK) sebagai variabel terikat (*dependent variabel*), Sedangkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pertumbuhan ekonomi (PDRB), Angka Pengangguran (AP), Angka Kemiskinan (AK) sebagai variabel bebas (*independent variabel*) selama kurun waktu tahun 2000 - 2012.

#### 3.1.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berbentuk Panel data (*pooling data*), yaitu gabungan dari data rangkaian runtut waktu Time Series ( $t$ ) dan data Cros Section ( $i$ ) yang bersumber melalui studi kepustakaan dari berbagai sumber, jurnal-jurnal, buku-buku, hasil penelitian maupun publikasi terbatas dari Badan Pusat Statistik Jawa Timur, serta lembaga atau instansi-intansi lain yang terkait dan mempunyai relevansi dengan pokok permasalahan yang dibahas. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di 4 Kabupaten di Madura (Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep) tahun 2000-2012 diperoleh dari Badan Pusat Statistik Jawa Timur.
- b. Pertumbuhan ekonomi (PDRB) di 4 Kabupaten di Madura (Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep) tahun 2000-2012 diperoleh dari Badan Pusat Statistik Jawa Timur.

- d. Angka Pengangguran (AP) di 4 Kabupaten di Madura (Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep) tahun 2000-2012 diperoleh dari Badan Pusat Statistik Jawa Timur.
- e. Angka Kemiskinan (AK) di 4 Kabupaten di Madura (Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep) tahun 2000-2012 diperoleh dari Badan Pusat Statistik Jawa Timur.

#### 3.1.4 Metode Analisis Data

Untuk mengetahui pengaruh besarnya APBD, PDRB dan Angka Pengangguran terhadap angka Kemiskinan di Madura tahun 2000-2012 digunakan Analisis Regresi Linier Berganda (*multiple linier regression method*) dengan model panel data dan sebagai alat pengolahan data menggunakan program Eviews 6. Data panel adalah data kombinasi antara deret waktu (*time series*) dan kerat lintang (*cross section*). Data *time series* adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu terhadap suatu individu. Sedangkan data *cross section* merupakan data yang dikumpulkan dalam satu waktu terhadap banyak individu. Metode data panel merupakan suatu metode yang digunakan untuk melakukan analisis empirik yang tidak mungkin dilakukan jika hanya menggunakan data *time series* maupun *cross section* (Gujarati, 2004: 637).

Ada dua Pendekatan mendasar yang digunakan dalam menganalisis panel data pertama, pendekatan *Fixed Effects Model* (FEM) dan kedua adalah pendekatan *Random Effects Model* (REM). Sebelum model diestimasi dengan model yang tepat, terlebih dahulu dilakukan uji spesifikasi apakah *Fixed Effects* atau *Random Effects* atau keduanya memberikan hasil yang sama. Pilihan antara *Fixed effects* dan *Random Effect* di tentukan dengan menggunakan uji hausman. Berkaitan dengan penggunaan data panel dalam penelitian ini, ada dua tehnik analisis yang dapat digunakan, yaitu:

1. Metode *Fixed Effect Model* (FEM) atau slope konstan akan tetapi intersep berbeda antara individu, menempatkan bahwa *it* merupakan kelompok spesifik atau berbeda dalam constant term pada model regresi. Bentuk model tersebut biasanya disebut model *least squares dummy variable* (LSDV). Pengertian *fixed effect* ini didasarkan adanya perbedaan intersep antar daerah, namun intersepanya sama antar waktu (*time invariant*). Disamping itu, model ini mengasumsikan bahwa koefisien regresi (*slope*) tetap antar individu dan antar

waktu. Untuk pendekatan *Fixed Effect* menggunakan uji F statistik. Adapun uji F statistik yang dilakukan sebagai berikut:

$$F(n - 1, nT - n - K) = \frac{(R^2_u - R^2_p)/(n - 1)}{(1 - R^2_u)/(nT - n - K)}$$

Dimana:

- u = *Unrestricted model*
- P = *restricted model*
- n = Jumlah Unit *cross section*
- T = Jumlah Unit Waktu
- K = Jumlah Parameter yang diestimasi

Jika ternyata hasil perhitungan uji  $F \geq F(n-1, nT-n-K)$  ini berarti  $H_0$  ditolak, artinya intersep untuk semua unit *cross section* tidak sama. Dalam hal ini akan digunakan *Fixed Effects* model untuk mengestimasi persamaan regresi.

2. Metode *Random Effect Model* (REM), meletakkan  $\alpha_i$  sebagai gangguan spesifik kelompok seperti halnya *eit* kecuali menetapkan untuk tiap-tiap kelompo, tetapi gambaran tunggal yang memasukkan regresi sama untuk tiap-tiap periode, atau dengan kata lain *Random Effect Model* (REM) menganggap bahwa seluruh gangguan yang terjadi mempunyai sifat acak atau random. Metode ini lebih tepat menggunakan metode *generalized least squares* (GLS) karena dengan menggunakan OLS tidak dapat digunakan untuk mendapatkan estimator yang efisien.

Dalam penelitian ini, model yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$AK_{it} = \beta_0 + \beta_1 APBD_{it} + \beta_2 PDRB_{it} + \beta_3 AP_{it} + e_{it}$$

Keterangan:

- AK = variabel angka kemiskinan
- APBD = variabel Anggaran pendapatan dan belanja daerah
- PDRB = variabel produk domestik regional bruto
- AP = variabel angka pengangguran
- $\beta_0$  = intersep/konstanta
- $\beta_1$  = koefisien regresi Anggaran pendapatan dan belanja daerah

$\beta_2$	= koefisien regresi produk domestik regional bruto
$\beta_3$	= koefisien regresi angka pengangguran
$e_{it}$	= disturbance error (variabel pengganggu)
$i$	= cross section (4 Kabupaten di Madura)
$t$	= time (2000-2012)

### 3.2 Pengujian Pemilihan Model dalam Pengolahan Data Panel

#### 3.2.1 Uji Hausman Test

Uji hausman test digunakan untuk menentukan apakah *fixed effect model* atau *random effect model* yang paling tepat digunakan dalam menganalisis tingkat kesejahteraan. Uji Hausman akan memberikan penilaian dengan menggunakan *Chi-Square statistics* sehingga keputusan pemilihan model dapat ditentukan secara benar. Penolakan terhadap statistik Hausman tersebut berarti penolakan terhadap *fixed effect model* atau *dummy variable model*. Sehingga semakin besar nilai statistik Hausman tersebut, semakin mengarah pada penerimaan dugaan *error component model* (Baltagi, 2003).

Prosedur Uji Hausman adalah sebagai berikut:

1. Buat Hipotesis dari uji Hausman:  $H_0 = \text{random effect}$  dan  $H_1 = \text{fixed effect}$
2. Menentukan kriteria uji: apabila *Chi-square* hitung  $>$  *Chi-square* tabel dan probabilitas hitung  $<$   $\alpha = 5\%$ , maka hipotesis  $H_0$  ditolak, sehingga metode *Fixed Effect Model* lebih tepat untuk digunakan. Dan apabila *Chi-square* hitung  $<$  *Chi-square* tabel dan probabilitas hitung  $>$   $\alpha = 5\%$ , maka hipotesis  $H_0$  diterima, sehingga metode *Random Effect Model* lebih tepat untuk digunakan.

Dari hasil uji yang dilakukan mendapatkan hasil sebagai berikut:

$H_0$  : Menggunakan estimasi *Random effect model*.

$H_1$  : Menggunakan estimasi *Fixed effect model*



### 3.3 Uji Statistik

Untuk mengetahui tingkat signifikansi dari masing-masing koefisien regresi variabel independen terhadap variabel dependen maka dapat menggunakan uji statistik diantaranya:

#### 3.3.1 Uji Koefisien Determinasi (Uji $R^2$ )

$R^2$  bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh variasi variabel independen dapat menerangkan dengan baik variasi variabel dependen. Untuk mengukur kebaikan suatu model (goodness of fit), digunakan koefisien determinasi ( $R^2$ ). Koefisien determinasi ( $R^2$ ) merupakan angka yang memberikan proporsi atau persentase variasi total dalam variabel tak bebas (Y) yang dijelaskan oleh variabel bebas (X) (Gujarati, 2004: 163).

Koefisien determinasi dirumuskan sebagai berikut:

$$R^2 = \frac{\sum (\hat{Y}_1 - \bar{Y})^2}{\sum Y_1 - \bar{Y})^2}$$

Nilai  $R^2$  yang sempurna adalah satu (1), yaitu apabila keseluruhan variasi dependen dapat dijelaskan sepenuhnya oleh variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Dimana  $0 < R^2 < 1$  sehingga kesimpulan yang dapat diambil adalah :

1. Nilai  $R^2$  yang kecil atau mendekati nol, berarti kemampuan variabel *independent* dalam menjelaskan variasi variabel *dependent* sangat lemah.
2. Nilai  $R^2$  mendekati satu, berarti kemampuan variabel *independen* dalam menjelaskan hampir semua informasi yang digunakan untuk memprediksi variasi variabel *dependent*.

### 3.4 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dimaksudkan untuk mengetahui apakah hasil estimasi memenuhi asumsi dasar linier klasik atau tidak. Hal ini sangat penting dikarenakan berhubungan erat dengan estimasi OLS (*Ordinary Least Square*) dari kriteria BLUE (*Best Linier Unbiased*).

#### 3.4.1 Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas merupakan suatu keadaan dimana satu atau lebih variabel independen dapat dinyatakan dalam kombinasi linier dari variabel bebas lainnya (Wardhono, 2004: 56-57). Bertujuan menguji, apakah model regresi ditemukan korelasi antar variabel independen. Model

regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel tidak ortodal. Variabel ortodal adalah variabel bebas yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. Pengujian ini akan menggunakan Auxiliari Regressions dan klien's rule of thumb untuk mendeteksi adanya multikolinieritas. Kriterianya adalah jika  $R^2$  regresi persamaan pertama lebih besar dari  $R^2$  auxiliary regressions maka didalam model tidak terdapat multikolinieritas, sebaliknya jika  $R^2$  regresi persamaan pertama lebih kecil dari  $R^2$  auxiliary regressions maka di dalam model terdapat multikolinieritas.

#### 3.4.2 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pengganggu pada periode  $t-1$  (sebelumnya) atau pada data deretan waktu (*cross-sectional*) (Wardhono, 2004:60-61). Untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi dapat dilakukan dengan Uji *Durbin – Watson* (DW test) dengan criteria sebagai berikut:

1. jika  $\sigma = 0$ ,  $d = 2$  berarti tidak ada autokorelasi
2. jika  $\sigma = 1$ ,  $d = 0$  berarti ada autokorelasi positif sempurna
3. jika  $\sigma = -1$ ,  $d = 4$  berarti ada autokorelasi negatif sempurna

#### 3.4.3 Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah kesalahan pengganggu mempunyai varians yang sama (Whardhono, 2004:57). Ada beberapa metode pengujian yang bisa digunakan diantaranya yaitu Uji Park, Uji Glesjer, Melihat pola grafik regresi, dan Uji White. Untuk menguji gejala heteroskedastisitas dalam model dilakukan dengan metode *General Least Square (Cross Section Weight)* yaitu dengan membandingkan *sum square resid* pada *weighted statistics* dengan *sum square resid unweighted statistic*. Jika *sum square resid* pada *weighted statistics* lebih kecil dari pada *sum square resid* pada *unweighted statistics*, maka model tersebut terdapat heteroskedastisitas

#### 3.4.4 Uji Normalitas

Normalitas data untuk menganalisis regresi adalah sebuah keharusan jika tidak normal maka dikhawatirkan hasil regresi nantinya tidak memberikan kesimpulan yang valid. Normalitas dapat dilihat dari nilai probabilitas jarque-bera. Jika signifikansinya lebih dari  $\alpha = 0,05$  (kesalahan terkecil 5%) maka data variabel tersebut normal (Whardhono, 2004:61).

### 3.5 Definisi Operasional

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Variabel operasional ini dimaksudkan untuk menjelaskan istilah yang digunakan dalam penelitian dan menghindari meluasnya permasalahan. Adapun variabel yang diteliti dalam penelitian ini antara lain :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana kerja pemerintah daerah yang mencakup seluruh pendapatan atau penerimaan dan belanja atau pengeluaran pemerintah daerah, baik Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam rangka mencapai sasaran pembangunan dalam kurun waktu satu tahun yang dinyatakan dalam satuan uang dan disetujui oleh DPRD dalam peraturan perundangan yang disebut peraturan daerah. Dinyatakan dalam Rupiah (Miliar Rp)
2. Pertumbuhan ekonomi/Produk Domestik Regional Bruto adalah pertumbuhan suatu wilayah yang diukur berdasarkan nilai sektor ekonomi dan dinyatakan dalam satuan Rupiah (Milliar Rp).
3. Angka pengangguran yaitu besarnya jumlah penduduk dalam suatu wilayah yang tidak bekerja dalam. Dinyatakan dalam satuan orang
4. Angka kemiskinan adalah banyaknya jumlah penduduk yang berada pada kondisi dimana seseorang atau sekelompok laki-laki dan perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat (Perpres Nomor 13 tahun 2009). Dinyatakan dalam satuan orang.

## BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data pengaruh APBD, PDRB dan Angka Pengangguran (AP) terhadap Angka Kemiskinan (AK) di Madura pada tahun 2000-2012, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. APBD berpengaruh positif dan signifikan terhadap angka kemiskinan (AK) hal ini sesuai dengan rumusan masalah.
2. PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap angka kemiskinan (AK), hal ini sesuai dengan rumusan masalah
3. Angka Pengangguran (AP) berpengaruh positif dan signifikan terhadap angka kemiskinan (AK), hal ini sesuai dengan rumusan masalah.

### 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka beberapa saran yang direkomendasikan diantaranya :

1. Dalam upaya peningkatan peluang kesempatan kerja dan peningkatan pertumbuhan ekonomi serta pemerataan pembangunan di madura maka dipandang perlu untuk mengoptimalkan penggunaan APBD efektif dan efisien, yakni lebih memprioritaskan porsi anggaran pada belanja langsung/pembangunan.
2. Dengan kondisi geografis yang ada penduduk pulau madura banyak yang bekerja di sektor pertanian (63,60%), selanjutnya sektor perdagangan (11,10%), sektor industri (9,40%) dan sektor jasa kemasyarakatan (7,60%). Rendahnya partisipasi angkatan kerja di sektor industri disebabkan oleh terbatasnya industri yang ada di Madura. Sedangkan pertanian yang ada sebagian besar adalah pertanian lahan kering. untuk itu perlunya perhatian pemerintah daerah di masing-masing kabupaten di madura untuk lebih memperhatikan sektor pertanian sebagai uratnadi perekonomian sebagian besar masyarakat.
3. Dengan beroperasinya jembatan suramadu yang menghubungkan antara pulau jawa dan pulau madura, maka akan semakin mempermudah dan mempercepat arus mobilitas perdagangan, selain itu bukan tidak mungkin madura menjadi sentra industri baru

beberapa tahun yang akan datang sehingga perlu adanya kajian yang lebih komperhensif bagaimana stakeholder-stakeholder terutama pemerintah daerah sendiri mempersiapkan hal tersebut.





## DAFTAR PUSTAKA

- Algifari, 2000. *Analisis Regresi : Teori, Kasus dan Solusi*. Edisi ke-2. Cetakan ke-1. Yogyakarta: BPFE.
- Badrudin, Rudy. 2012. *Ekonomika otonomi daerah*. Cetakan I. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Basri, Faisal H. 1995. *Perekonomian Indonesia Menjelang Abad XXI*. Cetakan II. Jakarta.: Erlangga.
- Berutu, Monanda. 2009. *Pengaruh APBD terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Dairi*. Fakultas Ekonomi-Universitas Sumatera Utara.
- Jonge, Huub. 2012. *Garam, Kekerasan dan Aduan Sapi*. Cetakan I. Yogyakarta: LKIS.
- Kunarjo. 1996. *Perencanaan dan Pembiayaan Pembangunan*. Edisi III. Jakarta: Universitas Indonesia-Press.
- Mirza, Sulistio. 2012. *Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah Tahun 2006-2009*. Fakultas Ekonomi-Universitas Negeri Semarang.
- Putra, Fadillah. 2001. *Paradigma Kritis dalam Studi Kebijakan Publik*. Cetakan I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rohman, Hermanto. 2012. *APBD bukan untuk Rakyat*. Cetakan I. Yogyakarta: Capiya Publishing.
- Santoso, Singgih. 2000. *Buku Latihan SPSS Statistik Parametrik*. Cetakan I. Jakarta: PT Elex Media Computindo.
- Saputri, Nindy. 2006. *Evaluasi Kinerja Ekonomi dalam pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Jember Periode 1995-2004*. Fakultas Ekonomi-Universitas Jember.
- Tambunan, Tulus. 2003. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Galia Indonesia.
- Yustika, Erani. 2012. *Perekonomian Indonesia*. Cetakan I. Malang: Bayumedia Publishing.
- Juniarti, Dian Putri. 2012. *Pengaruh Jembatan Suramadu terhadap Pertumbuhan Ekonomi Madura*. Fakultas Ekonomi Ekonomi-Universitas Trunojoyo Madura. <http://pusatdata.jatimprov.go.id/eis/content.php?dept=488> (12 Oktober 2013).
- wikipedia. 2013. *Masyarakat Madura*. [http://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat\\_Madura](http://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat_Madura) (12 Oktober 2013).

## Lampiran 1

Tabel data Analisis....

Tahun	KABUPATEN	AK (orang)	APBD (milliard)	PDRB (milliard)	AP (orang)
2000	Sampang	308824	6580	198622	11231
	Bangkalan	197447	8296	199435	14991
	Sumenep	287307	10880	310957	14981
	Pamekasan	233119	8821	151727	11237
2001	Sampang	342725	15864	235147	10276
	Bangkalan	154256	12313	228816	15801
	Sumenep	209135	40052	302598	12104
	Pamekasan	138426	21059	172712	12750
2002	Sampang	338700	27150	268105	6845
	Bangkalan	152445	26367	260656	21733
	Sumenep	206679	67284	347079	8470
	Pamekasan	136800	25909	197270	15979
2003	Sampang	427663	34699	296428	4686
	Bangkalan	181515	31447	287850	13696
	Sumenep	177629	47253	383394	11728
	Pamekasan	144755	32753	219487	12191
2004	Sampang	333984	26716	336451	10097
	Bangkalan	195899	29712	325067	24812
	Sumenep	191824	45365	434139	6303
	Pamekasan	184097	28650	249030	13661
2005	Sampang	337205	29332	340277	19168
	Bangkalan	247932	36554	438547	59669
	Sumenep	204165	31512	671541	43074
	Pamekasan	192647	33223	279611	32195
2006	Sampang	329485	43788	393376	17766
	Bangkalan	201843	53899	502575	59329
	Sumenep	214957	60839	792774	42393
	Pamekasan	213926	48812	326358	24719
2007	Sampang	314429	50860	450131	9005
	Bangkalan	274923	60859	544862	34453
	Sumenep	254781	68866	791432	20565
	Pamekasan	208534	56975	362690	19121
2008	Sampang	302780	56075	513719	16023
	Bangkalan	303990	66114	607698	32562
	Sumenep	290610	74885	910247	24081

	Pamekasan	213550	56711	396551	15614
2009	Sampang	285020	79029	560069	8124
	Bangkalan	287650	74572	669586	23754
	Sumenep	264980	95253	1002762	13849
	Pamekasan	200980	61580	438582	10247
2010	Sampang	274520	74301	605820	7868
	Bangkalan	285531	75513	746607	25008
	Sumenep	259532	92283	1116333	11343
	Pamekasan	193065	78642	491690	15471
2011	Sampang	271483	74944	689278	16458
	Bangkalan	269254	115543	836846	16949
	Sumenep	251930	109244	1208037	21217
	Pamekasan	194472	98275	561532	11559
2012	Sampang	280836	84214	734864	8469
	Bangkalan	264901	120470	950281	24217
	Sumenep	247180	117936	1273305	7493
	Pamekasan	227490	102582	635852	10552

## Lampiran 2

## Descriptive statistik

	AK	APBD	PDRB	AP
Mean	5047.327	1837.769	2443.346	54439.52
Median	4363.000	1523.000	2475.000	52379.50
Maximum	12733.00	5966.000	4276.000	120470.0
Minimum	1517.000	468.0000	1368.000	6580.000
Std. Dev.	2786.360	1195.618	619.8288	30762.62
Skewness	0.993194	1.874527	0.394879	0.413124
Kurtosis	3.297756	6.598088	2.952046	2.317974
Jarque-Bera Probability	8.741193 0.012644	58.50354 0.000000	1.356370 0.507537	2.486997 0.288374
Sum	262461.0	95564.00	127054.0	2830855.
Sum Sq. Dev.	3.96E+08	72904655	19593576	4.83E+10
Observations	52	52	52	52

Lampiran 3  
Regresi Panel Data Metode Fixed Effek

Dependent Variable: AK  
Method: Panel Least Squares  
Date: 11/20/14 Time: 11:50  
Sample: 2000 2012  
Periods included: 13  
Cross-sections included: 4  
Total panel (balanced) observations: 52

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1262.386	1157.248	-1.090851	0.2811
APBD	0.400914	0.182327	2.198872	0.0331
PDRB	0.607755	0.325023	1.869883	0.0680
AP	0.075092	0.013325	5.635208	0.0000

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.781341	Mean dependent var	5047.327
Adjusted R-squared	0.752186	S.D. dependent var	2786.360
S.E. of regression	1387.074	Akaike info criterion	17.43243
Sum squared resid	86578886	Schwarz criterion	17.69510
Log likelihood	-446.2432	Hannan-Quinn criter.	17.53313
F-statistic	26.79998	Durbin-Watson stat	2.473469
Prob(F-statistic)	0.000000		



Lampiran 4  
Regresi Panel Data Metode Random Efek

Dependent Variable: AK  
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)  
Date: 11/20/14 Time: 11:57  
Sample: 2000 2012  
Periods included: 13  
Cross-sections included: 4  
Total panel (balanced) observations: 52  
Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1320.184	926.1435	-1.425464	0.1605
APBD	0.383943	0.164048	2.340425	0.0235
PDRB	0.602616	0.318509	1.891991	0.0645
AP	0.076957	0.006357	12.10633	0.0000

Effects Specification

	S.D.	Rho
Cross-section random	0.000000	0.0000
Idiosyncratic random	1387.074	1.0000

Weighted Statistics

R-squared	0.781001	Mean dependent var	5047.327
Adjusted R-squared	0.767313	S.D. dependent var	2786.360
S.E. of regression	1344.073	Sum squared resid	86713569
F-statistic	57.05963	Durbin-Watson stat	2.462105
Prob(F-statistic)	0.000000		

Unweighted Statistics

R-squared	0.781001	Mean dependent var	5047.327
Sum squared resid	86713569	Durbin-Watson stat	2.462105

Lampiran 5  
Uji Hausman Test

Correlated Random Effects - Hausman Test  
Equation: RANDOM  
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	0.070002	3	0.9952

\*\* WARNING: estimated cross-section random effects variance is zero.

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
APBD	0.400914	0.383943	0.006331	0.8311
PDRB	0.607755	0.602616	0.004192	0.9367
AP	0.075092	0.076957	0.000137	0.8735

Cross-section random effects test equation:

Dependent Variable: AK  
Method: Panel Least Squares  
Date: 11/20/14 Time: 12:08  
Sample: 2000 2012  
Periods included: 13  
Cross-sections included: 4  
Total panel (balanced) observations: 52

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1262.386	1157.248	-1.090851	0.2811
APBD	0.400914	0.182327	2.198872	0.0331
PDRB	0.607755	0.325023	1.869883	0.0680
AP	0.075092	0.013325	5.635208	0.0000

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.781341	Mean dependent var	5047.327
Adjusted R-squared	0.752186	S.D. dependent var	2786.360
S.E. of regression	1387.074	Akaike info criterion	17.43243
Sum squared resid	86578886	Schwarz criterion	17.69510
Log likelihood	-446.2432	Hannan-Quinn criter.	17.53313
F-statistic	26.79998	Durbin-Watson stat	2.473469
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran 6  
Analisis Regresi dengan metode Fixed Effek

Dependent Variable: AK				
Method: Panel Least Squares				
Date: 11/20/14 Time: 11:50				
Sample: 2000 2012				
Periods included: 13				
Cross-sections included: 4				
Total panel (balanced) observations: 52				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
	t			
C	<b>-1262.386</b>	1157.248	-1.090851	<b>0.2811</b>
APBD	<b>0.400914</b>	0.182327	2.198872	<b>0.0331</b>
PDRB	<b>0.607755</b>	0.325023	1.869883	<b>0.0680</b>
AP	<b>0.075092</b>	0.013325	5.635208	<b>0.0000</b>
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.781341	Mean dependent var	5047.327	
Adjusted R-squared	<b>0.752186</b>	S.D. dependent var	2786.360	
S.E. of regression	1387.074	Akaike info criterion	17.43243	
Sum squared resid	86578886	Schwarz criterion	17.69510	
Log likelihood	-446.2432	Hannan-Quinn criter.	17.53313	
F-statistic	26.79998	Durbin-Watson stat	2.473469	
Prob(F-statistic)	0.000000			
Crossid Kapupaten	Effect			
Sampang	<b>-24.65308</b>			
Bangkalan	<b>-78.94743</b>			
Sumenep	<b>-27.86237</b>			
Pamekasan	<b>131.4629</b>			

$$AK = -1262.38600246 + 0.400913813159*APBD + 0.60775489476*PDRB + 0.0750919612939*AP + [CX=F]$$

Lampiran 7  
Uji F

Dependent Variable: AK				
Method: Panel Least Squares				
Date: 11/20/14 Time: 11:50				
Sample: 2000 2012				
Periods included: 13				
Cross-sections included: 4				
Total panel (balanced) observations: 52				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
	t			
C	-1262.386	1157.248	-1.090851	0.2811
APBD	0.400914	0.182327	2.198872	0.0331
PDRB	0.607755	0.325023	1.869883	0.0680
AP	0.075092	0.013325	5.635208	0.0000
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.781341	Mean dependent var	5047.327	
Adjusted R-squared	0.752186	S.D. dependent var	2786.360	
S.E. of regression	1387.074	Akaike info criterion	17.43243	
Sum squared resid	86578886	Schwarz criterion	17.69510	
Log likelihood	-446.2432	Hannan-Quinn criter.	17.53313	
F-statistic	26.79998	Durbin-Watson stat	2.473469	
<b>Prob(F-statistic)</b>	<b>0.000000</b>			

Lampiran 8  
Uji t-Statistik

Dependent Variable: AK				
Method: Panel Least Squares				
Date: 11/20/14 Time: 11:50				
Sample: 2000 2012				
Periods included: 13				
Cross-sections included: 4				
Total panel (balanced) observations: 52				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
	t			
C	-1262.386	1157.248	-1.090851	<b>0.2811</b>
APBD	0.400914	0.182327	2.198872	<b>0.0331</b>
PDRB	0.607755	0.325023	1.869883	<b>0.0680</b>
AP	0.075092	0.013325	5.635208	<b>0.0000</b>
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.781341	Mean dependent var	5047.327	
Adjusted R-squared	0.752186	S.D. dependent var	2786.360	
S.E. of regression	1387.074	Akaike info criterion	17.43243	
Sum squared resid	86578886	Schwarz criterion	17.69510	
Log likelihood	-446.2432	Hannan-Quinn criter.	17.53313	
F-statistic	26.79998	Durbin-Watson stat	2.473469	
Prob(F-statistic)	0.000000			



Lampiran 9  
Uji R<sup>2</sup>

Dependent Variable: AK				
Method: Panel Least Squares				
Date: 11/20/14 Time: 11:50				
Sample: 2000 2012				
Periods included: 13				
Cross-sections included: 4				
Total panel (balanced) observations: 52				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
	t			
C	-1262.386	1157.248	-1.090851	0.2811
APBD	0.400914	0.182327	2.198872	0.0331
PDRB	0.607755	0.325023	1.869883	0.0680
AP	0.075092	0.013325	5.635208	0.0000
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.781341	Mean dependent var	5047.327	
<b>Adjusted R-squared</b>	<b>0.752186</b>	S.D. dependent var	2786.360	
S.E. of regression	1387.074	Akaike info criterion	17.43243	
Sum squared resid	86578886	Schwarz criterion	17.69510	
Log likelihood	-446.2432	Hannan-Quinn criter.	17.53313	
F-statistic	26.79998	Durbin-Watson stat	2.473469	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Lampiran 10  
 Uji Asumsi Klasik  
 Uji Multikolinieritas dengan Deteksi Klein

### 1. Model Auxiliary APBD

#### Dependent Variable: APBD

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
PDRB	-0.246760	0.260305	-0.947964	0.3481
AP	0.002207	0.010771	0.204924	0.8385
C	2320.529	871.0421	2.664083	0.0106

#### Effects Specification

##### Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.206143	Mean dependent var	1837.769
<b>Adjusted R-squared</b>	<b>0.119855</b>	S.D. dependent var	1195.618
S.E. of regression	1121.682	Akaike info criterion	16.99121
Sum squared resid	57875845	Schwarz criterion	17.21636
Log likelihood	-435.7715	Hannan-Quinn criter.	17.07753
F-statistic	2.388994	Durbin-Watson stat	1.433564
Prob(F-statistic)	0.052288		

### 2. Model Auxiliary PDRB

#### Dependent Variable: PDRB

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
APBD	-0.077651	0.081914	-0.947964	0.3481
AP	0.000924	0.006043	0.152824	0.8792
C	2535.772	368.5198	6.880966	0.0000

#### Effects Specification

##### Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.070482	Mean dependent var	2443.346
<b>Adjusted R-squared</b>	<b>-0.030553</b>	S.D. dependent var	619.8288
S.E. of regression	629.2263	Akaike info criterion	15.83503
Sum squared resid	18212586	Schwarz criterion	16.06017
Log likelihood	-405.7107	Hannan-Quinn criter.	15.92134
F-statistic	0.697600	Durbin-Watson stat	2.035012
Prob(F-statistic)	0.627976		

### 3. Model Auxiliary AP

#### Dependent Variable: AP

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
APBD	0.413221	2.016464	0.204924	0.8385
PDRB	0.549456	3.595351	0.152824	0.8792

C                                 52337.60         10218.03         5.122086         0.0000

---



---

Effects Specification

---



---

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.775500	Mean dependent var	54439.52
<b>Adjusted R-squared</b>	<b>0.741098</b>	S.D. dependent var	30762.62
S.E. of regression	15347.49	Akaike info criterion	22.22346
Sum squared resid	1.08E+10	Schwarz criterion	22.44860
Log likelihood	-571.8099	Hannan-Quinn criter.	22.30977
F-statistic	31.78002	Durbin-Watson stat	1.177944
Prob(F-statistic)	0.000000		

---



Lampiran 11  
 Uji Asumsi Klasik  
 Uji Heterokedastisitas

Dependent Variable: AK  
 Method: Panel EGLS (Period random effects)  
 Date: 11/20/14 Time: 11:59  
 Sample: 2000 2012  
 Periods included: 13  
 Cross-sections included: 4  
 Total panel (balanced) observations: 52  
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1262.386	1153.700	-1.094206	0.2797
APBD	0.400914	0.181768	2.205635	0.0326
PDRB	0.607755	0.324026	1.875634	0.0672
AP	0.075092	0.013285	5.652539	0.0000

Effects Specification

	S.D.	Rho
Cross-section fixed (dummy variables)		
Period random	0.000000	0.0000
Idiosyncratic random	1382.822	1.0000

Weighted Statistics

R-squared	0.781341	Mean dependent var	5047.327
Adjusted R-squared	0.752186	S.D. dependent var	2786.360
S.E. of regression	1387.074	<b>Sum squared resid</b>	<b>86578886</b>
F-statistic	26.79998	Durbin-Watson stat	2.473469
Prob(F-statistic)	0.000000		

Unweighted Statistics

R-squared	0.781341	Mean dependent var	5047.327
<b>Sum squared resid</b>	<b>87394451</b>	Durbin-Watson stat	2.473469

Lampiran 12  
 Uji Asumsi Klasik  
 Uji AutoKorelasi

Dependent Variable: AK				
Method: Panel Least Squares				
Date: 11/20/14 Time: 11:50				
Sample: 2000 2012				
Periods included: 13				
Cross-sections included: 4				
Total panel (balanced) observations: 52				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1262.386	1157.248	-1.090851	0.2811
APBD	0.400914	0.182327	2.198872	0.0331
PDRB	0.607755	0.325023	1.869883	0.0680
AP	0.075092	0.013325	5.635208	0.0000
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.781341	Mean dependent var	5047.327	
Adjusted R-squared	0.752186	S.D. dependent var	2786.360	
S.E. of regression	1387.074	Akaike info criterion	17.43243	
Sum squared resid	86578886	Schwarz criterion	17.69510	
Log likelihood	-446.2432	Hannan-Quinn criter.	17.53313	
F-statistic	26.79998	<b>Durbin-Watson stat</b>	<b>2.473469</b>	
Prob(F-statistic)	0.000000			



## Lampiran 13

## Uji Asumsi Klasik

## Uji Normalitas

